

**Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, Belanja  
Pemerintah , Dana Desa, dan Covid 19 Terhadap Kemiskinan di Provinsi  
Kalimantan 2015-2022**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

Nama : NATASYA SAVITRI ZAEN

NIM : 20313265

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi, seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku :

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Penulis



Natasya Savitri Zaen

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PDRB, TINGKAT PENGANGGURAN, BELANJA  
PEMERINTAH, DANA DESA, DAN COVID-19 TERHADAP  
KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN

Oleh :

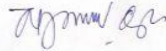
**Natasya Savitri Zaen**

NIM : 20313265

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing,  
20 Agustus 2024



Prof. Agus Widarjono, S.E., MA., Ph.D

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya dan memberikan kelancaran serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, dan Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan”**. Tidak lupa juga kita haturkan shalawat serta salam kepada junjungan dan tauladaan, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulisan Skripsi ini diselesaikan guna melengkapi Tugas Akhir Program Sarjana Setrata satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam meyelesaikan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, peneliti melalui banyak kendala-kendala dan tidak akan selesai jika tanpa adanya dukungan serta doa dari berbagai pihak dalam kerjasama, bantuan, serta bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Yth. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Yth. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Prodi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Yth. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, membantu serta senantiasa membimbing sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Orang tua tersayang Zainal Abidin S.E dan Henny Sutriana S.Pd. yang telah berusaha, mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya yang mungkin tidak bisa terbalaskan.

5. Kepada Adik ku tercinta, Najwa Azzahra Zaen yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan yang tiada hentinya dalam menyusun Skripsi ini.
6. Kepada Billy Chandra, terima kasih telah membantu dalam memberikan semangat dan selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman yang saya sayangi Aura Putri, Zalfa, Keysha, Aulia, Nindy, Ravi, Alvin, Juvie, dan Pandu.
8. Kepada Teman-teman yang selalu mendukung saya, Halizah Nabila, Budhi Alfiyyah, Diang Noelanda, Iqlima Az-Zahra, Putri Kamila.
9. Kepada Teman-teman seperbimbingan, Aufa, Putri, dan Emran yang telah membantu, berjuang bersama-sama dan memberikan dukungan dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
10. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang tanpa tiada hentinya dalam menjalankan masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dalam penulisan, maka dari itu peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca dan dapat dijadikan masukan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Penulis

Natasya Savitri Zaen

NIM: 20313265



**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

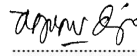
Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, dan Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan

Disusun oleh : NATASYA SAVITRI ZAEN

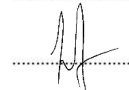
Nomor Mahasiswa : 20313265

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Jum'at, 06 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D



Penguji : Prastowo, SE., M.Ec.Dev.



Mengetahui  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
\* YOGYAKARTA \*  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



## HALAMAN MOTTO

“Dan memintalah pertolongan dengan sabar dan sholat”.

(Q.S Al Baqarah: 45)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.

(Q.S Al-Qashas: 77)

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Kajian Pustaka .....	17
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Kemiskinan.....	20
2.2.1.1 Pengertian Kemiskinan.....	20
2.2.1.2 Klasifikasi Kemiskinan.....	21
2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	23
2.2.3 Belanja Pemerintah.....	24
2.2.3.1 Pengertian Belanja Pemerintah.....	24
2.2.4 Pengangguran .....	24
2.2.4.1 Pengertian Pengangguran .....	24
2.2.4.2 Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya .....	25
2.2.4.3 Pengangguran Berdasarkan Ciri-Ciri.....	26
2.2.5 Dana Desa .....	27

2.2.6	Sumber Dana Desa.....	28
2.3	Hubungan Antar Variabel.....	28
2.3.1	Hubungan Antara PDRB dan Kemiskinan.....	28
2.3.2	Hubungan Antara Pengangguran dan Kemiskinan .....	29
2.3.3	Hubungan Antara Belanja Pemerintah dan Kemiskinan.....	29
2.3.4	Hubungan Antara Dana Desa dan Kemiskinan .....	30
2.5	Kerangka Pemikiran .....	31
2.6	Hipotesis.....	32
BAB III	.....	33
METODE PENELITIAN	.....	33
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	33
3.2	Variabel Penelitian .....	33
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	33
3.3.1	Variabel Dependen (Y) .....	33
3.3.2	Variabel Independen (X) .....	34
3.4	Metode Analisa Data.....	35
3.4.1	Common Effect Model (CEM) .....	36
3.4.2	Fixed Effect Model (FEM).....	37
3.4.3	Random Effect Model (REM) .....	38
3.5	Pemilihan Model .....	39
3.5.1	Uji F .....	39
3.5.2	Uji Lagrange Multiplier (LM) .....	40
3.5.3	Uji Hausman.....	41
3.6	Pengujian Statistik.....	42
3.6.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	42
3.6.2	Uji Simultan (Uji F) .....	43
3.6.3	Uji t.....	44
BAB IV	.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	.....	46

4.1	Deskripsi Data .....	46
4.2	Pengujian Model Regresi .....	47
4.2.1	<i>Common Effect Model (CEM)</i> .....	47
4.2.2	<i>Fixed Effect Model</i> .....	48
4.2.3	<i>Random Effect Model</i> .....	49
4.3	Pemilihan Model .....	49
4.3.1	Uji F .....	49
4.3.2	Uji Lagrange Multiplier (LM) .....	50
4.3.3	Uji Hausman.....	51
4.4	Analisis Hasil Regresi.....	52
4.4.1	Koefisien Deteminasi ( $R^2$ ) .....	52
4.4.2	Uji Simultan (Uji F) .....	52
4.4.3	Uji Parsial (Uji t) .....	52
4.4.3.1	Pengujian pengaruh PDRB terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan.....	53
4.4.3.2	Pengujian pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan .....	53
4.4.3.3	Pengujian pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan .....	54
4.4.3.4	Pengujian pengaruh Dana Desa terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan.....	54
4.4.3.5	Pengujian pengaruh Covid-19 terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan.....	54
4.5	Interpretasi Hasil.....	55
4.5.1	Hubungan PDRB Terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	55
4.5.2	Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	55
4.5.3	Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap Persentase Penduduk Miskin ..	56
4.5.4	Hubungan Dana Desa terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	57
4.5.5	Hubungan Covid 19 terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	57

BAB V.....	59
KESIMPULAN.....	59
5.1 Kesimpulan Utama.....	59
5.2 Implikasi Kebijakan.....	60
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, dan pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan selama periode 2015-2022. Data yang digunakan adalah data panel dari 47 kabupaten/kota di 5 provinsi di Kalimantan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Pengangguran memiliki pengaruh negatif namun signifikan, Belanja Pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan, sementara COVID-19 memperburuk kondisi kemiskinan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di Kalimantan.

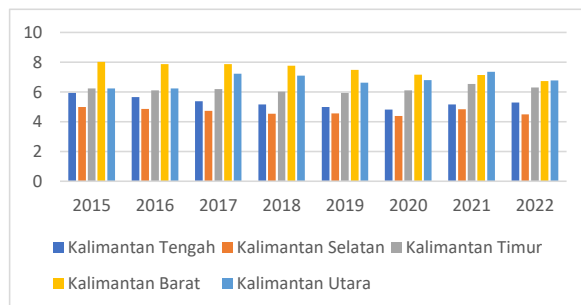
Kata Kunci: *Kemiskinan, PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, COVID-19, Kalimantan, Data Panel*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu dari berbagai permasalahan utama disetiap negara, seperti Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar dalam menekan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang cukup penting yaitu berperan dalam mencari solusi dan berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah harus terus berupaya dengan berbagai macam cara agar dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia, permasalahan kemiskinan ini juga dapat dilihat dari berbagai faktor penyebab dan dampaknya. Hal ini menjadikan kemiskinan menjadi permasalahan penting dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam memahami permasalahan tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia, perlu adanya suatu perhatian lebih pada setiap masing masing daerah, pada tingkat lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). Dalam mengatasi kemiskinan, baik secara lokal maupun nasional ini pemerintah melaksanakan berbagai agenda pemulihan ekonomi.



### **Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data persentase kemiskinan yang terlihat pada Gambar 1.1, dapat diamati bahwa tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Kalimantan mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2022.

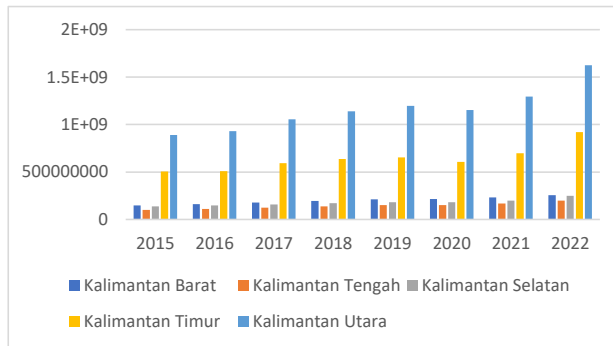
Pada tahun 2015, persentase kemiskinan di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di antara provinsi lainnya, tercatat sebesar 8,24%. Pada tahun 2016, angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 8,02%, dan kembali naik menjadi 8,09% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi 7,34%, yang kemudian terus menurun menjadi 7,20% pada tahun 2019 dan 7,02% pada tahun 2020. Namun, persentase kemiskinan di Kalimantan Timur meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 7,41% dan mencapai 7,54% pada tahun 2022. Di sisi lain, Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan di provinsi ini sebesar 6,48%, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,79% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, angka ini turun menjadi 6,61%, dan terus menurun hingga mencapai 5,86% pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020, terjadi sedikit peningkatan menjadi 5,94%, namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,13%, dan pada tahun 2022 menjadi 6,21%. Kalimantan Selatan memulai tahun 2015 dengan persentase kemiskinan sebesar 5,73%, yang kemudian menurun sedikit menjadi 5,68% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018, angka ini terus menurun menjadi 5,23% dan 4,94% masing-masing. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 5,35%, dan terus meningkat menjadi 5,66% pada tahun 2021 dan 5,87% pada tahun 2022. Kalimantan Barat menunjukkan tren fluktuatif, dimulai dengan persentase kemiskinan sebesar 6,77% pada tahun 2015, yang kemudian menurun menjadi 6,53% pada tahun 2016 dan 6,36% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka ini naik menjadi 6,68%, sebelum menurun menjadi 6,52% pada tahun 2019 dan 6,43% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, persentase kemiskinan di Kalimantan Barat kembali mengalami

peningkatan, masing-masing menjadi 6,56% dan 6,75%. Kalimantan Utara memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan di provinsi ini sebesar 5,24%, yang kemudian meningkat menjadi 5,71% pada tahun 2016. Angka ini menurun menjadi 5,55% pada tahun 2017 dan 5,13% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, persentase kemiskinan di Kalimantan Utara mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,35%, dan terus meningkat menjadi 5,62% pada tahun 2020, 5,81% pada tahun 2021, dan mencapai 6,01% pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa penurunan dalam persentase kemiskinan di beberapa provinsi di Kalimantan, tren fluktuatif tetap terlihat sepanjang periode tersebut.

Kemiskinan juga berdampak bagi perekonomian suatu negara, semakin tinggi angka kemiskinan di suatu negara maka dampak yang akan dihasilkan akan semakin besar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia diantaranya seperti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan alokasi Dana Desa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah, peningkatan PDRB dapat mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah. Dengan peningkatan tersebut seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, namun di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi belum tentu sejalan dengan pengurangan kemiskinan dikarenakan distribusi pendapatan yang belum merata. Harga konstan dalam PDRB juga dapat menunjukkan bentuk nilai tambah barang atau jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Perhitungan ini dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dan juga dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah.



**Gambar 1.2 PDRB**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data PDRB yang terlihat pada Gambar 1.2, dapat diamati bahwa terdapat variasi pertumbuhan PDRB di berbagai provinsi di Kalimantan dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, Kalimantan Barat mencatat PDRB sebesar sekitar 800 miliar, yang kemudian terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016, PDRB Kalimantan Barat meningkat menjadi lebih dari 900 miliar dan pada tahun 2017 mencapai sekitar 1 triliun. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana PDRB Kalimantan Barat tercatat mencapai lebih dari 1,7 triliun, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan PDRB tertinggi di antara semua provinsi di Kalimantan.

Di sisi lain, Kalimantan Selatan juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun pada skala yang lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat. Pada tahun 2015, PDRB Kalimantan Selatan berada di sekitar 400 miliar, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi lebih dari 600 miliar.

Provinsi lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga menunjukkan pertumbuhan PDRB yang stabil selama periode yang sama, meskipun dengan nilai yang lebih kecil. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan PDRB di semua provinsi di Kalimantan, dengan Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan paling signifikan.

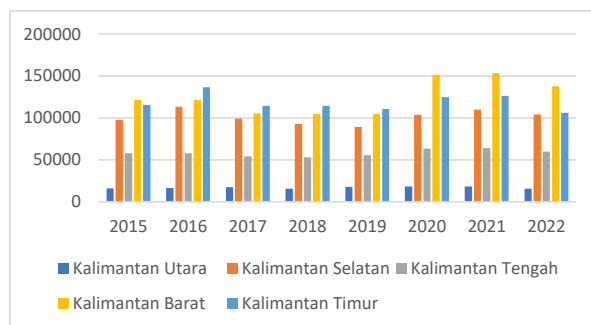
Tingkat Pengangguran merupakan salah satu indikator yang sangat relevan dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara maupun suatu daerah atau wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya menunjukkan kurangnya kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat, tetapi juga dapat mengindikasikan berbagai masalah struktural dalam perekonomian wilayah tersebut. Di Kalimantan, tingkat pengangguran yang tinggi dapat dihubungkan dengan beberapa faktor spesifik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

Pertama, Kalimantan merupakan wilayah yang sebagian besar ekonominya bergantung pada sektor-sektor primer seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sektor-sektor ini, meskipun penting, cenderung memiliki sifat siklus dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga komoditas seperti batu bara atau kelapa sawit menurun, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi produksi atau menutup operasi, yang mengakibatkan PHK massal dan peningkatan tingkat pengangguran.

Kedua, ketergantungan yang besar pada sektor-sektor primer juga berarti bahwa diversifikasi ekonomi di Kalimantan relatif rendah. Kurangnya investasi dalam sektor-sektor lain yang lebih padat karya seperti manufaktur dan jasa, menyebabkan terbatasnya peluang kerja bagi penduduk setempat. Ini semakin diperparah oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan aksesibilitas yang rendah di beberapa bagian Kalimantan, yang menghambat pertumbuhan industri lain di luar sektor-sektor primer tersebut.

Ketiga, meskipun Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tingginya tingkat pengangguran juga dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak penduduk lokal yang tidak memiliki keterampilan teknis atau pendidikan yang memadai untuk bekerja di sektor-sektor yang lebih maju secara teknologi, yang mengakibatkan kesenjangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan pasar.

Selain itu, kurangnya investasi dalam sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan di Kalimantan turut berperan dalam memperburuk situasi ini. Tanpa akses ke pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja modern, penduduk lokal sulit bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi.



**Gambar 1.3 Pengangguran**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tingkat pengangguran yang terlihat pada Gambar 1.3, dapat diamati bahwa tingkat pengangguran di berbagai provinsi di Kalimantan menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Berdasarkan grafik, pada tahun 2015, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat tercatat sekitar 120.000 jiwa, yang kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2016 dan mencapai puncaknya di tahun 2017 dengan lebih dari 140.000 jiwa. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2018 dan kembali meningkat hingga tahun 2022. Sementara itu, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren yang serupa, di mana tingkat pengangguran pada tahun 2015 tercatat di sekitar 120.000 jiwa, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi hampir 150.000 jiwa. Setelah itu, terjadi fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2018, namun kembali meningkat di tahun-

tahun berikutnya, dengan puncaknya di tahun 2021 dan sedikit penurunan pada tahun 2022. Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2015, Kalimantan Utara memiliki tingkat pengangguran sekitar 20.000 jiwa, yang tetap stabil hingga tahun 2022.

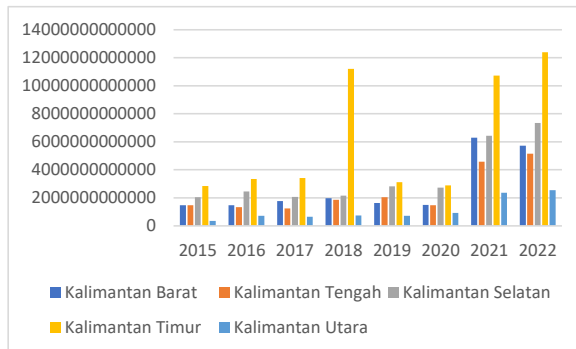
Di sisi lain, Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan bertahap dalam tingkat pengangguran dari tahun 2015 hingga 2022, dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Kalimantan Selatan menunjukkan tingkat pengangguran yang cukup stabil selama periode tersebut, dengan sedikit fluktuasi tetapi tidak ada perubahan signifikan yang dapat diamati dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan bervariasi di antara provinsi-provinsi tersebut, dengan beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur mengalami fluktuasi yang lebih besar, sedangkan provinsi lain seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah menunjukkan perubahan yang lebih stabil namun tetap meningkat.

Belanja pemerintah merupakan salah satu indikator yang paling relevan dalam mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Belanja pemerintah yang tinggi di suatu daerah dapat mengindikasikan adanya upaya yang kuat dari pemerintah dalam menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, belanja pemerintah yang tinggi juga perlu diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan.

Di Provinsi Kalimantan, belanja pemerintah sering kali mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan geografis, seperti aksesibilitas yang rendah dan perlunya pembangunan infrastruktur dasar. Investasi di sektor-sektor tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih tertinggal. Belanja pemerintah yang tinggi di Kalimantan juga

dapat disebabkan oleh program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, alokasi anggaran yang besar sering kali juga digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata, yang merupakan sektor unggulan di wilayah ini. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas belanja pemerintah di Kalimantan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan masalah dalam pelaksanaan proyek dapat menghambat tercapainya tujuan pengeluaran pemerintah yang tinggi



**Gambar 1.4 Belanja Pemerintah**

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan yang terlihat pada Gambar 1.4 di atas, dapat diamati bahwa terjadi variasi signifikan dalam alokasi belanja pemerintah di berbagai provinsi selama periode 2015 hingga 2022. Berdasarkan grafik, pada tahun 2015, Kalimantan Timur mencatat belanja pemerintah tertinggi di antara semua provinsi, dengan anggaran mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Angka ini kemudian mengalami peningkatan setiap tahun, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2017, di mana belanja pemerintah di Kalimantan Timur mencapai lebih dari 120 triliun rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai lebih dari 140 triliun rupiah.

Provinsi Kalimantan Barat juga menunjukkan peningkatan belanja pemerintah yang konsisten dari tahun 2015 hingga 2022. Pada tahun 2015, belanja pemerintah di Kalimantan Barat tercatat sekitar 10 triliun rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 50 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara menunjukkan tingkat belanja pemerintah yang lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Meskipun demikian, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencatat peningkatan yang stabil dalam belanja pemerintah selama periode tersebut, dengan masing-masing provinsi mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022.

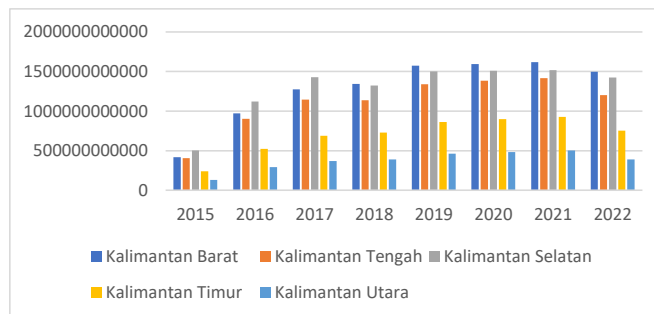
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan alokasi anggaran terbesar. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan.

Dana desa merupakan inisiatif strategis yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, termasuk di provinsi-provinsi di Kalimantan. Dengan alokasi dana yang disediakan, pemerintah berharap desa-desa dapat memanfaatkannya untuk mengimplementasikan berbagai program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Kalimantan, di mana terdapat banyak wilayah terpencil dan infrastruktur yang belum memadai, dana desa menjadi sumber yang sangat penting untuk mendorong pembangunan.

Melalui dana desa, pemerintah bertujuan untuk membiayai berbagai proyek seperti pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih, serta pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa-desa. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta program pertanian dan perikanan yang

berkelanjutan. Dengan demikian, dana desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di provinsi-provinsi Kalimantan, di mana tantangan geografis dan aksesibilitas sering menjadi kendala, penggunaan dana desa yang efektif sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Pengalokasian dana ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi di banyak wilayah pedesaan di Kalimantan. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, agar dana yang relatif besar ini benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kalimantan.

Dalam konteks Kalimantan, perhatian khusus harus diberikan pada bagaimana dana desa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi desa-desa di wilayah tersebut, seperti keterbatasan akses transportasi, minimnya fasilitas publik, dan kebutuhan akan program-program ekonomi yang dapat mendiversifikasi sumber penghasilan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, dana desa bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.



**Gambar 1.6 Dana Desa**

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data alokasi Dana Desa di Provinsi Kalimantan yang terlihat pada Grafik di atas, dapat diamati bahwa terdapat variasi dalam jumlah dana yang diterima oleh setiap provinsi dari tahun 2015 hingga 2022. Berdasarkan grafik, pada tahun 2015, Kalimantan Barat menerima alokasi Dana Desa sebesar lebih dari 4 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 menjadi lebih dari 8 triliun rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan jumlah sekitar 16 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, alokasi Dana Desa di Kalimantan Barat mengalami sedikit penurunan, meskipun tetap berada pada angka yang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang serupa, dengan peningkatan alokasi Dana Desa dari sekitar 8 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi lebih dari 12 triliun rupiah pada tahun 2016. Jumlah ini kemudian stabil dan bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan sekitar 14 triliun rupiah, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga menunjukkan peningkatan dalam alokasi Dana Desa, meskipun dengan variasi yang lebih kecil. Pada tahun 2015, Kalimantan Timur menerima sekitar 4 triliun rupiah, yang kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan sekitar 8 triliun rupiah. Sementara itu, Kalimantan Utara, meskipun memiliki alokasi Dana Desa yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, juga mengalami peningkatan dari sekitar 2 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi lebih dari 4 triliun rupiah pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa di provinsi-provinsi di Kalimantan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menerima alokasi dana terbesar. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan di tingkat desa di wilayah Kalimantan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan

melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh dana ini.



**Gambar 1.7 Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.7 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Pulau Jawa pada satu tahun tertentu. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 11.04%, diikuti oleh Jawa Tengah (10.77%) dan Jawa Timur (10.35%). Provinsi lain seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, masing-masing 7.62%, 6.17%, dan 4.44%. Meskipun tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan bukanlah yang tertinggi namun pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi Indonesia, dengan infrastruktur yang sangat berkembang. Sementara itu, pulau Kalimantan memang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun hasil ekonominya sering kali tidak merata karena kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan 5 Provinsi dan 47 Kabupaten di Kalimantan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2022. Dimana setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, seperti ketergantungan pada sektor-sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan, serta rendahnya diversifikasi ekonomi dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, dana desa menjadi faktor penting yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan melalui pembangunan di tingkat desa. Penelitian ini penting

karena memfokuskan pada peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, belanja pemerintah, alokasi Dana Desa, dan pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di Kalimantan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan maka diajukan rumusan masalah berupa pertanyaan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan?
4. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan?
5. Apakah Covid-19 berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
5. Untuk menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi penelitian masa depan, khususnya berkaitan dengan dampak PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, dan Covid-19 terhadap Kemiskinan.

#### **2. Manfaat Praktisi**

Pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara diharapkan dapat memanfaatkan informasi yang diberikan penelitian ini dalam menganalisis dampak PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Daerah, Dana Desa, dan Covid-19 terhadap Kemiskinan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini Sistematika penulisan dipecahkan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab I pada penelitian ini membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab II pada penelitian ini membahas kajian pustaka terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian dan landasan teori semua variabel baik variabel terikat maupun bebas.

#### BAB III: Metodologi Penelitian

Bab III pada penelitian ini membahas tentang jenis dan sumber data, pengertian operasional variabel, metode analisis, memilih model estimasi, pemilihan model terbaik dan uji statistik.

#### BAB IV: Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab IV pada penelitian ini membahas tentang deskripsi data penelitian, estimasi regresi data panel, pemilihan model, evaluasi hasil regresi data panel metode fixed effect, interpretasi hasil, hasil dan pembahasan pada penelitian serta analisis intersep.

#### BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan yang dapat di ambil pada penelitian ini dan saran yang diberikan yang diharapkan dapat berguna bagi akademik penelitian selanjutnya maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan menggunakan variable serta persamaan yang sama, sehingga mampu dijadikan sebagai referensi. Didalam penelitian tersebut memuat dan berisi informasi yang penting. penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Daniswari (2022) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2016-2021”. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa variable penelitian ini Dana Desa dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Sedangkan PDRB dan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Darmawan (2022) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun Periode 2012-2020”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series* dan *cross section*). Data yang digunakan adalah Regresi data panel dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling benar dan digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam uji ini model dilakukan dengan tiga alternatif yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran, produk domestik regional bruto dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

Pratama (2022) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020”. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan memilih terlebih dahulu metode mana yang terbaik antara model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan metode uji chow dan hausman serta uji statistik melalui uji determinasi, uji F dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Roseline (2023) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode panel regresi menggunakan Random Effect Model. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, variabel PDRB Perkapita dan IPM masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021.

Primadani (2022) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, PDRB, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2020”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data panel dengan cross section 29 kabupaten dan time

series selama 5 tahun. Analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Putri & Putri(2021) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Kemiskinan”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder panel dari tahun 2010-2019 yang diperoleh dari lembaga terkait dan kemudian dianalisis menggunakan model regresi data panel dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Utari (2024) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap PDRB Perkapita, Pengangguran Terbuka, dan Kemiskinan Provinsi Riau”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada PDRB perkapita, pengangguran terbuka, dan kemiskinan di Provinsi Riau.

Yacoub(2012) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Pada penelitian ini penelitian menggunakan metode

regresi dengan bantuan program SPSS 18.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangguran berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan namun terbentuk hubungan yang berlawanan arah (negatif) yang secara teori seharusnya searah (positif).

Lokasi, tahun, dan faktor independen penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Kemiskinan di empat puluh tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Daerah, dan Dana Desa di Provinsi Kalimantan pada tahun 2015 hingga 2022 sebagai variabel independen.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Kemiskinan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki banyak definisi yang berbeda hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang terkait dengan berbagai faktor di sekitarnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Menurut Todaro (2006), kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup layak minimum. Sharp dan kawan-kawan, serta Mudrajat Kunchoro (2006), menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dari perspektif ekonomi dapat dilihat dari beberapa faktor: (a) ketimpangan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, (b) perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan (c) perbedaan akses terhadap modal. Faktor-faktor inilah yang menciptakan teori lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi juga

ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara dalam kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Kemiskinan juga memiliki dampak negatif yang luas, termasuk menghambat pembangunan ekonomi. Di Indonesia, kemiskinan diukur dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar oleh BPS, dengan menggunakan indeks jumlah kepala untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin. Penyebab kemiskinan di Indonesia meliputi kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan mentalitas dan budaya masyarakat. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional rata-rata dan ketimpangan distribusi pendapatan.

#### **2.2.1.2 Klasifikasi Kemiskinan**

##### 1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar standar hidup minimum. Kebutuhan tersebut meliputi unsur-unsur penting seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Dalam hal ini, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah pengeluaran atau konsumsi untuk kebutuhan dasar guna memenuhi standar kesejahteraan (Suryawati et al., 2019). Kemiskinan absolut paling sering digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang disebut miskin.

##### 2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari kebijakan pembangunan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga hal ini mengakibatkan distribusi pendapatan tidak

merata. Kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan, yang mana hal ini menyebabkan kemiskinan relatif tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama (Wahyu, 2009).

### 3) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi karena kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung kesejahteraan manusia, seperti kondisi alam yang kering dan tidak teratur, kelangkaan sumber daya alam, atau letak geografis yang terisolasi (Bappenas, 2018).

### 4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada situasi di mana sekelompok orang tidak dapat mengakses fasilitas dan sarana ekonomi secara merata karena struktur sosial tidak mendukung distribusi pendapatan yang adil.

Jenis kemiskinan ini terjadi ketika penduduk suatu wilayah tidak memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang tersedia karena wilayah tersebut tidak memiliki layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan masyarakat (Aima et al., 2021).

### 5) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada pola pikir dan cara hidup yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok, hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan latar belakang budaya seseorang atau kelompok, di mana seseorang atau kelompok secara terus-menerus merasa tidak mampu dan kurang. Pengelompokan masyarakat semacam ini menunjukkan ketidakmauan untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif pembangunan dan menunjukkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan dan mengubah kualitas hidup mereka. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka dianggap rendah berdasarkan ukuran yang umum digunakan (Djaenal et al., 2021).

### 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB juga dapat diartikan sebagai nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. PDRB menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan tiap daerah bergantung pada kondisi serta potensi sumber daya di wilayah tersebut. PDRB digunakan sebagai instrumen untuk menilai keadaan ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu, baik berdasarkan harga saat ini maupun harga konstan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah pertumbuhan ekonomi seringkali ditentukan oleh data PDRB, yang meliputi pendapatan dan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan.

Ada dua metode utama untuk menghitung PDRB:

1. **PDRB atas dasar Harga Konstan:** Mengukur pertumbuhan ekonomi tahunan tanpa terpengaruh oleh perubahan harga.
2. **PDRB atas dasar Harga Berlaku:** Menunjukkan struktur ekonomi, perubahan, dan ketersediaan sumber daya berdasarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung setiap tahunnya dengan menggunakan harga saat itu.

PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tahunan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan perubahan nilai tambah setiap tahun berdasarkan harga yang berlaku. Kombinasi antara faktor internal (endogen) dan eksternal (eksogen) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung pemerataan pendapatan dan memajukan ekspansi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dalam meningkatkan potensi produksi dan pendapatan masyarakat.

### **2.2.3 Belanja Pemerintah**

#### **2.2.3.1 Pengertian Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah merupakan alokasi dana yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Tujuan utama dari pengeluaran pemerintah adalah untuk menyediakan barang dan jasa publik, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendorong stabilitas makro ekonomi. Dengan pengeluaran ini, pemerintah berperan aktif dalam mengatur perekonomian dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil di masyarakat.

### **2.2.4 Pengangguran**

#### **2.2.4.1 Pengertian Pengangguran**

Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ketika jumlah individu yang siap dan mampu bekerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Secara umum, pengangguran dianggap sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, karena tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan ekonomi untuk menyediakan pekerjaan yang cukup bagi populasinya. Pengangguran dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar, fluktuasi ekonomi, atau perubahan struktural dalam ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan pengangguran sebagai individu yang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan, individu yang sedang memulai usaha

atau mencari pekerjaan, dan individu yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya.

#### **2.2.4.2 Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya**

##### **1) Pengangguran friksional**

Pengangguran friksional terjadi karena para pencari kerja mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan informasinya akibat informasi yang kurang memadai atau tidak akurat. Salah satu jenis pengangguran yang dikenal dengan istilah "pengangguran friksional" disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan lowongan pekerjaan dengan kebutuhan pekerja. Hal ini dikarenakan perusahaan dan para pencari kerja membutuhkan waktu untuk berinteraksi dengan pasar tenaga kerja. Hal ini wajar saja terjadi, misalnya ketika seseorang ingin pindah ke pekerjaan yang lebih baik atau ketika seorang lulusan perguruan tinggi atau sekolah baru mulai mencari pekerjaan.

##### **2) Pengangguran struktural**

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di suatu daerah tertentu, dan karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja antar daerah. Adanya lowongan pekerjaan dan pengangguran secara bersamaan mengindikasikan bahwa para penganggur tersebut tidak hanya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja, tetapi mereka juga tidak tinggal di daerah yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini juga terjadi ketika pelamar kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia posisi tersebut.

##### **3) Pengangguran siklis**

Pengangguran siklis terjadi karena permintaan agregat yang rendah atau permintaan defisit atau fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis. Selama resesi, banyak bisnis mengurangi permintaan mereka terhadap input, termasuk tenaga kerja, karena produksi menurun. Pengangguran siklis meningkat selama resesi dan menurun selama ekspansi.

#### **2.2.4.3 Pengangguran Berdasarkan Ciri-Ciri**

##### 1) Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah posisi yang terbuka tidak sebanyak jumlah individu yang bekerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Akibatnya, perekonomian mengalami peningkatan jumlah orang yang tidak memiliki kesempatan kerja. Untuk beberapa waktu, mereka tidak dapat bekerja karena situasi ini. Oleh karena itu, individu-individu ini disebut sebagai penganggur terbuka karena mereka menganggur separuh waktu. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pengangguran terbuka adalah menurunnya aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan pekerja, atau terhambatnya pengembangan industri tertentu.

##### 2) Pengangguran musiman

Industri pertanian dan perikanan menjadi penyebab utama pengangguran ini. Petani sering kali malas mulai dari menanam hingga memanen. Selain itu, mereka tidak dapat memanfaatkan tanahnya saat musim kemarau, sehingga terpaksa menganggur jika tidak memiliki pekerjaan lain. Pengangguran jenis ini disebut pengangguran musiman.

##### 3) Pengangguran setengah menganggur

Di negara berkembang, migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, sering terjadi. Oleh karena itu, tidak semua penduduk yang bermigrasi ke daerah metropolitan memperoleh pekerjaan dengan cepat. Sebagian besar dari mereka terpaksa bekerja penuh waktu tanpa digaji. Selain itu, sebagian orang tidak mengalami pengangguran tetapi memiliki jam kerja yang jauh lebih sedikit

dari rata-rata. Penduduk hanya dapat bekerja satu atau dua hari atau satu atau dua jam sehari. Karyawan dengan jam kerja di atas tersebut merupakan pengangguran setengah menganggur.

#### 4) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah individu yang bekerja tetapi tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, benar, dan efisien. Masalah ini terjadi karena industri atau peluang usaha yang kecil. Oleh karena itu, perusahaan tidak mempekerjakan semua karyawannya untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian, jumlah pekerja akan melebihi jumlah pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi dapat menjadi catatan penting bagi perusahaan untuk mempekerjakan karyawannya agar dapat bekerja dengan baik, yang dapat berdampak besar pada hasil produksi perusahaan. Kelangsungan hidup pada tahap produksi suatu produk akan meningkat apabila perusahaan dapat memaksimalkan lapangan kerja yang ada.

### 2.2.5 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk menampung berbagai kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi anggaran bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan. Pemerataan dicapai melalui Alokasi Dasar, sedangkan keadilan diperoleh melalui Alokasi Formula yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis desa. Kebijakan Dana Desa merupakan bagian dari Nawacita, khususnya tujuan ketiga, yaitu yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antardesa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

### **2.2.6 Sumber Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa pengalokasian Dana Desa dilakukan secara adil dan merata berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmatif, dan alokasi formula.

Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa. Pagu Alokasi Afirmatif dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional yaitu kepada desa yang tertinggal dan desa yang sangat tertinggal dimana desa ini memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, dengan bobot masing-masing 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 50% (lima puluh persen) untuk tingkat kemiskinan, 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan Antara PDRB dan Kemiskinan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah adalah total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam ekonomi lokal. Ketika PDRB meningkat, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nasional, yang pada gilirannya

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB bukanlah satu-satunya indikator pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan di masyarakat dan dampaknya juga harus diperhatikan, karena ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat mengurangi produktivitas keseluruhan di wilayah tersebut yang hubungan antara PDRB dan kemiskinan bersifat kompleks, Peningkatan PDRB yang berkelanjutan dan inklusif berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan, tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **2.3.2 Hubungan Antara Pengangguran dan Kemiskinan**

Pengangguran dan kemiskinan saling berhubungan dalam sebuah siklus di mana masing-masing dapat memperburuk kondisi yang lain. Dampak negatif dari pengangguran adalah menurunnya tingkat pendapatan yang diterima masyarakat hal ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat ikut menurun dan mengakibatkan pengangguran semakin memperburuk kemiskinan, karena rendahnya pendapatan. Menurut teori lingkaran setan (Liker, 2004), kemiskinan sering kali disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Dengan demikian, pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi salah satu dari masalah ini adalah dengan menggunakan strategi yang holistik agar dapat mencakup peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial.

### **2.3.3 Hubungan Antara Belanja Pemerintah dan Kemiskinan**

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, terutama di sektor-sektor yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan

infrastruktur, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan belanja di sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka. Dengan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan dan kesehatannya, yang merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, belanja pemerintah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Infrastruktur yang baik juga membuka akses ke pasar dan layanan, yang penting bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, efektivitas belanja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan juga tergantung pada bagaimana pendapatan dan sumber daya tersebut didistribusikan di masyarakat.

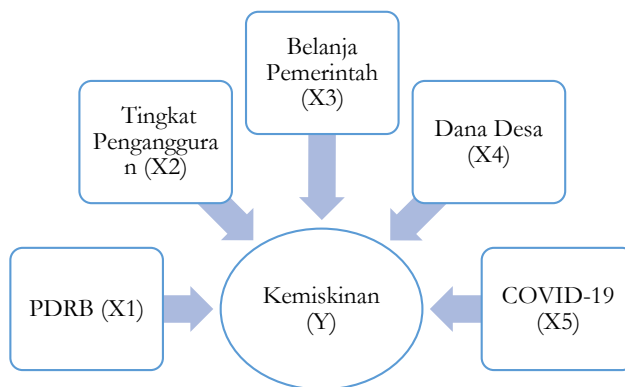
#### **2.3.4 Hubungan Antara Dana Desa dan Kemiskinan**

Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas dasar, serta program-program peningkatan kesejahteraan. Penggunaan dana desa ini bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas air bersih, membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa. Dengan infrastruktur yang lebih baik, peluang ekonomi baru dapat muncul, seperti kemudahan dalam distribusi barang dan jasa, akses yang lebih baik ke pasar, dan peningkatan produktivitas. Ini semua berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, seperti

penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Program-program ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memberikan mereka kemampuan untuk keluar dari kemiskinan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, melalui alokasi yang tepat dan pemanfaatan yang efektif, dana desa dapat menjadi alat yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang merangkum seluruh dasar pemikiran dan teori-teori yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Kerangka penelitian ini dapat divisualisasikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan proses penelitian yang dilakukan. Berikut adalah ilustrasi kerangka berpikir tersebut:



## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan respons awal terhadap masalah penelitian yang nantinya akan diuji kebenarannya menggunakan data yang terkumpul dan dianalisis. Berdasarkan teori dan konteks masalah, hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
2. Diduga variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
3. Diduga variabel Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
4. Diduga variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
5. Diduga variabel COVID-19 berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

**Commented [1]:** Hipotesis variabel covid belum ada

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Data panel yang digunakan pada penelitian ini menggabungkan data *cross-section* dari 47 Kabupaten dari 5 Provinsi Kalimantan dengan data *time series* dari tahun 2015 hingga 2022. *National Single Window for Investment (NSWI)* dan Badan Pusat Statistik (BPS) data yang digunakan pada penelitian ini. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif ini maka dapat dijelaskan pengaruh variabel independen yaitu PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa terhadap variabel dependen Kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

##### **3.2 Variabel Penelitian**

Penelitian ini mencakup dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa di 47 Kabupaten di Provinsi Kalimantan

##### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

###### **3.3.1 Variabel Dependen (Y)**

Kemiskinan memberikan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian. Selain berdampak bagi perekonomian dampak lain yang dirasakan yaitu kesejahteraan yang tidak maksimum. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara dengan data berupa presentase pada periode 2015-2022.

### 3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Adapun variabel independen yang dianalisis meliputi :

a. PDRB (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara selama periode 2015 – 2022, dinyatakan dalam jutaan rupiah dan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

b. Tingkat Pengangguran(X2)

Menurut teori pengangguran dapat dihitung dengan perbandingan para jumlah orang yang menganggur dengan Angkatan kerja, pengangguran juga mengacu pada orang yang tidak memiliki pekerjaan yang nyata. Data Tingkat Pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara selama periode 2015-2022 dalam satuan jiwa (orang) dan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

c. Belanja Pemerintah(X3)

Pengeluaran pemerintah merupakan jumlah uang yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, ini mencakup biaya untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembayaran untuk layanan

publik/masyarakat, gaji pegawai negeri, serta pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lain di setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara selama periode 2015 – 2022, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

d. Dana Desa(X4)

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dihitung 72 persen berdasarkan pagu alokasi dasar, 3 persen berdasarkan pagu alokasi afirmasi, dan 25 persen berdasarkan pagu alokasi formula. Dana Desa ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pendanaan bagi pemerintahan, memberdayakan masyarakat, 38 membina masyarakat, dan mendorong pembangunan. Variabel Dana Desa ini diukur dalam satuan milyar rupiah, dengan sumber data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

### 3.4 Metode Analisa Data

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel. Dalam proses analisis data, metode yang digunakan adalah analisis kausalitas, fokus pada hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, terdapat dua kategori variabel yang menjadi fokus, yakni variabel terikat dan variabel bebas. Jumlah observasi setiap unit cross section dan time series dalam penelitian ini sama, sehingga disebut model panel data yang seimbang (balance panel). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,01 atau 1%, 0,05 atau 5%, dan 0,10 atau 10% untuk menilai diterima atau ditolaknya hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan uji F. Selain itu, untuk mengetahui dampak masing-masing variabel bebas terhadap jumlah penduduk miskin, dilakukan uji satu sisi dengan menggunakan

uji t pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,01 atau 1%, 0,05 atau 5%, dan 0,10 atau 10%. Penelitian ini menggunakan analisis data panel sebagai teknik analisis datanya dengan memanfaatkan program Eviews 13. Gujarati (2012) menguraikan berbagai keunggulan yang terkait dengan pendekatan data panel adalah sebagai berikut :

1. Data panel memiliki kemampuan untuk secara eksplisit mengatasi heterogenitas individu dengan memanfaatkan variabel individu yang spesifik.
2. Dengan mengintegrasikan observasi deret waktu dan cross-section, data panel dapat menjangkau informasi dan variasi yang lebih luas dan beragam, mengurangi multikolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan atau degree of freedom, dan mendapatkan estimasi hasil yang efisien.
3. Dengan menganalisis observasi cross-section secara berulang-ulang melalui pendekatan time series, data panel menjadi pilihan yang paling sesuai untuk memahami dinamika perubahan.
4. Data panel dapat mengidentifikasi dan mengukur dampak yang tidak dapat terlihat pada data time-series murni dan cross-section murni.
5. Model perilaku yang kompleks mudah dipelajari dengan data panel.
6. Dengan memanfaatkan data panel, potensi bias yang disebabkan oleh pengumpulan data individual dapat dikurangi.

Menurut Gujarati (2012) menjelaskan bahwa dengan adanya keunggulan tersebut dalam model data panel tidak diperlukannya untuk melakukan uji asumsi klasik. Estimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga metode atau pendekatan (Widarjono, 2018).

#### **3.4.1 Common Effect Model (CEM)**

Dalam persamaan regresi linier, salah satu pendekatan paling umum untuk memperkirakan nilai parameter adalah Common Effect Model (CEM), yakni suatu pendekatan yang menggabungkan data cross-section dan time series dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk memperkirakan

parameternya. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku antar individu ialah sama di berbagai periode waktu, karena model ini tidak mempertimbangkan dimensi waktu dan individu. Bentuk persamaan model common effect dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Persentase Penduduk Miskin

$\beta_0$  : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$\ln X_1$  : log dari PDRB

$\ln X_2$  : log dari Pengangguran

$\ln X_3$  : log dari Belanja Pemerintah

$\ln X_4$  : log dari Dana Desa

$i$  : Objek yang digunakan yakni 47 kabupaten

$t$  : Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)

$e_{it}$  : error term atau residual

### 3.4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Estimasi dengan Fixed Effect Model merupakan suatu pendekatan yang berasumsi terdapat perbedaan intersep dengan melibatkan penggunaan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep dalam persamaan regresi. Model ini mengasumsikan intersep yang berbeda-beda untuk individu dan tetap sama antar periode, sedangkan koefisien regresi atau slope tetap sama antar individu dan periode. Estimasi dengan Fixed Effect Model yang memanfaatkan variabel dummy seperti ini biasa disebut dengan Least Square Dummy Variable (LSDV). Bentuk persamaan model fixed effect dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \langle 1D_{46} + \dots + \langle 46D_{46} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Persentase Penduduk Miskin

$\beta_0$  : Intersep  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$\ln X_1$  : log dari PDRB

$\ln X_2$  : log dari Tingkat Pengangguran

$\ln X_3$  : log dari Belanja Pemerintah

$\ln X_4$  : log dari Dana Desa

$\langle 1, \dots, \langle 46$  : Intersep dummy setiap kabupaten

$D_1, D_2, \dots, D_{46}$  : Dummy setiap kabupaten, 1 untuk lintas kabupaten yang berpengaruh dan 0 untuk lintas kabupaten yang tidak berpengaruh.

$i$  : Objek yang digunakan yakni 47 kabupaten

$t$  : Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)

$eit$  : error term atau residual

### 3.4.3 Random Effect Model (REM)

Metode random effect merupakan estimasi data panel dengan memanfaatkan variabel gangguan (error terms). Dalam pendekatan model ini dilakukan estimasi data panel, di mana variabel gangguan dapat memiliki korelasi baik antar waktu maupun individu. Metode Generalized Least Square (GLS) merupakan metode yang tepat untuk mengestimasi random effect model, karena dapat mengatasi korelasi yang terjadi antara variabel gangguan. Bentuk persamaan model random effect dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \langle 1 D_{46} + \dots + \langle 46 D_{46} + (eit + \mu_i)$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Persentase Penduduk Miskin

$\beta_0$  : Rata-rata populasi yang parameternya tidak diketahui

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$\ln X_1$  : log dari PDRB

$\ln X_2$  : log dari Tingkat Pengangguran

$\ln X_3$  : log dari Belanja Pemerintah

$\ln X_4$  : log dari Dana Desa

$i$  : Objek yang digunakan yakni 47 kabupaten

$t$  : Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)

$eit$  : variabel gangguan gabungan cross-section dan time series

$\mu_i$  : variabel gangguan berbeda antar individu tetapi sama antar waktu

### 3.5 Pemilihan Model

Saat memperkirakan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan regresi data panel, salah satu dari tiga model estimasi harus dipilih berdasarkan model yang paling tepat. Sebagaimana dikemukakan oleh Widarjono (2018), terdapat tiga uji yang digunakan untuk memastikan ketepatan model data panel untuk suatu penelitian. Berikut ini adalah Uji F, Uji Lagrange Multiplier, dan Uji Hausman.

#### 3.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel dengan asumsi bahwa intersep dan slope adalah sama dan tidak menyertakan variabel dummy (*common effect model*) atau 43 estimasi data panel dengan asumsi bahwa intersep berbeda tetapi slope tetap sama dan menyertakan variabel dummy (*fixed effect model*). Uji F-statistik dapat digunakan untuk melakukan pengujian ini. Rumus uji F adalah sebagai berikut.

$$F = \frac{SSRR - SSRU}{q} \cdot \frac{SSRU}{(n-k)}$$

Keterangan:

$SSRR$  : restricted sum squared of residuals

$SSRU$  : unresricted sum squared of residuals

$q$  : pembatas dalam model tanpa dummy

$n$  : jumlah observasi

$k$  : jumlah parameter estimasi

Berikut hipotesis yang mendasari uji F:

$H_0$  = *common effect model* lebih tepat dari *fixed effect model*

$H_a$  = *fixed effect model* lebih tepat dari *common effect model*

Dasar untuk hipotesis ini melibatkan perbandingan antara nilai F hitung dan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung melebihi nilai F tabel,  $H_0$  akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, gagal menolak  $H_0$ , dan model yang tepat adalah *common effect model*. Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka  $H_0$  ditolak, dan menunjukkan *fixed effect model* yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak  $H_0$ , dan *common effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

### 3.5.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier yang dirumuskan oleh Breusch Pagan digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel random effect model atau estimasi data panel common effect model metode OLS. Pendekatan Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random Effect mengandalkan nilai residu yang diperoleh dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Nilai statistik LM diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$LM = LM = nT^2(T-1) \left( \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_{it}^2 \right) / \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^n (\hat{\epsilon}_{it} - \bar{\epsilon}_t)^2$$

Keterangan:

$n$  = jumlah individu

$T$  = jumlah periode waktu

$\hat{\epsilon}$  = residual common effect metode (OLS)

Berikut hipotesis yang mendasari uji LM:

$H_0$  = common effect model lebih tepat dari random effect model

$H_a$  = random effect model lebih tepat dari common effect model

Uji LM menggunakan distribusi chi-squares dengan derajat kebebasan sejumlah variabel bebas. Apabila nilai LM yang didapat lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares,  $H_0$  akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *random effect model*. Sebaliknya, jika nilai LM yang didapat lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-squares, gagal menolak  $H_0$ , dan model yang tepat adalah *common effect model*. Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka  $H_0$  ditolak, dan menunjukkan *random effect model* yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak  $H_0$ , dan *common effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

### 3.5.3 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan random effect model yang berasumsi bahwa terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode Generalized Least Squares (GLS) atau fixed effect model yang berasumsi bahwa tidak terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Nilai uji Hausman diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$m = \hat{q} \text{ var } (\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Keterangan:

$m$  : nilai Chi-squares statistik dari uji Hausman

$\hat{q}$  : perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

$\text{var } (\hat{q})$ : kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

Berikut hipotesis yang mendasari uji Hausman:

$H_0$  = random effect model lebih tepat dari fixed effect model

$H_a$  = fixed effect model lebih tepat dari random effect model

Dasar untuk hipotesis ini melibatkan perbandingan antara Chi-square statistik dan nilai Chi-square kritis yang didapat dari tabel distribusi nilai Chisquare dengan menggunakan *degree of freedom* sejumlah variabel bebas. Apabila Chi-square statistik yang didapat lebih besar dari nilai chi-squares kritis,  $H_0$  akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika Chi-square statistik yang didapat lebih kecil dari nilai chi-squares kritis, gagal menolak  $H_0$ , dan model yang tepat adalah *random effect model*. Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka  $H_0$  ditolak, dan menunjukkan *fixed effect model* yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak  $H_0$ , dan *random effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

### 3.6 Pengujian Statistik

Uji statistik digunakan untuk menyimpulkan penelitian dan menilai sejauh mana hasil regresi dapat mewakili kondisi populasi sebenarnya. Pengujian statistik dalam penelitian ini mencakup Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji F (Uji Simultan), dan Uji t (Uji Parsial).

#### 3.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur sejauh mana variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berkisar antara nol sampai satu. Semakin mendekati nilai satu, hal ini menandakan bahwa variabel bebas yang diikutsertakan dalam model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut.

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Keterangan:

$R^2$  : Koefisien Regresi

$RSS$  : Residual Sum of Squares

$TSS$  : Total Sum of Squares

### 3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan merupakan suatu metode untuk menguji apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama.  $F$  hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$$

Keterangan:

$ESS$  : Explained Sum of Squares

$RSS$  : Residual Sum of Squares

$n$  : Jumlah Observasi

$k$  : Jumlah Parameter Estimasi

Pada pengujian simultan ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F$  hitung dengan nilai  $F$  kritis. Nilai  $F$  kritis diperoleh dengan menghitung derajat kebebasan (degree of freedom). Pada tabel distribusi  $F$  terdapat dua derajat kebebasan, yaitu degree of freedom denominator dan degree of freedom numerator, yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

df denominator :  $n - k$

df numerator :  $k - 1$

Keterangan:  $n$  : Jumlah Observasi

$k$  : Jumlah Parameter Estimasi

Setelah itu, uji simultan memerlukan pembentukan hipotesis sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Rumusan hipotesis dari uji simultan sebagai berikut.

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa terhadap variabel jumlah Penduduk Miskin.

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel variabel PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa terhadap variabel jumlah Penduduk Miskin.

Dalam proses pengambilan keputusan, jika nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F kritis, maka keputusan yang diambil gagal menolak hipotesis nul ( $H_0$ ). Sebaliknya jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F kritis, maka keputusan yang diambil menolak hipotesis nul ( $H_0$ ).

### 3.6.3 Uji t

Uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi secara individual variabel independen terhadap variabel dependen biasa disebut dengan uji t karena mengacu pada tabel distribusi t. Nilai t-kritis dapat diperoleh dengan menentukan degree of freedom menggunakan rumus  $df = n - k$ , merujuk pada tabel distribusi t berdasarkan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 1% (0.01), 5% (0,05), dan maksimal 10% (0.10). Nilai t-statistik dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$t = \beta_1 - \beta_1 * se(\beta_1)$$

Keterangan:

$\beta_1$  : Koefisien Regresi

$\beta_1 *$  : Nilai hipotesis nol

$se(\beta_1)$  : Standar error Rumusan hipotesis dari uji parsial setiap variabel independen sebagai berikut :

1. Variabel PDRB ( $X_1$ )

$H_0 : \beta_1 = 0$ , variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_1 < 0$ , variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

2. Variabel Tingkat Pengangguran (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$ , variabel Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_2 > 0$ , variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

3. Variabel Belanja Pemerintah (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$ , variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_3 < 0$ , variabel Belanja Pemerintah berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

4. Variabel Dana Desa (X4)

$H_0 : \beta_3 = 0$ , variabel Dana Desa tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_3 < 0$ , variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

Keputusan yang diperoleh dari hipotesis tersebut dengan melakukan perbandingan nilai t-statistik dengan nilai t-kritis. Jika nilai t-statistik lebih tinggi dari nilai t-kritis, maka keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ . Namun, jika nilai t-statistik lebih rendah dari nilai t-kritis, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak  $H_0$ . Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan, maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan maka gagal menolak  $H_0$ .

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

Analisis Deskripsi Statistik di bawah ini memuat informasi statistik antara lain mean (rata-rata), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Berikut analisis statistik deskriptif yang dapat diperoleh dari data tersebut :

**Tabel 4.1 Deskripsi Statistik**

Variabel	N	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Deviation
Kemiskinan	376	6.6162234	13.51	2.55	2.336972992
PDRB Tingkat Pengangguran	376	19085837.9	240392590	1980622.5	29614853.26
Belanja Pemerintah Dana Desa	376	5684.20479	31397	347	4580.835437
	376	724267.428	5475960.6	11180.59	640306.8459
	376	108853.746	348604.26	9547.068	61542.04243

Sumber : Hasil Eviews

Berdasarkan hasil deskripsi statistik pada Tabel 4.1. total observasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berjumlah 376. Persentase Tingkat Kemiskinan menunjukkan nilai terendah sebesar 13.51% di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, sementara nilai tertingginya sebesar 2.55% di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2018. Nilai rata-rata pada variabel Jumlah Kemiskinan adalah sebesar 6.61% dengan standar deviasi sebesar 2.336972992.

Pada PDRB memiliki total observasi yang berjumlah 376. PDRB ini menunjukkan nilai terendah sebesar 1.980.622,5 milyar rupiah di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2015, sementara nilai tertinggi sebesar 240.392.590 milyar rupiah di Kabupaten

Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Nilai rata-rata PDRB adalah sebesar 19.085.837,9 milyar rupiah dengan standar deviasi 29614853.26.

Pada Tingkat Pengangguran memiliki total observasi yang berjumlah 376. Tingkat pengangguran ini menunjukkan nilai terendah sebesar 347 jiwa di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022, sementara nilai tertinggi sebesar 31.397 jiwa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016. Nilai rata-rata pada variabel Tingkat Pengangguran adalah sebesar 5684.20479 (jiwa) dengan standar deviasi sebesar 4580.835437.

Pada Belanja Pemerintah memiliki total observasi yang berjumlah 376. Variabel Belanja Pemerintah ini menunjukkan nilai terendah sebesar 11.180,59 milyar rupiah di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019, sementara nilai tertinggi sebesar 5.475.960,6 triliun rupiah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Nilai rata-rata pada variabel Belanja Pemerintah adalah sebesar 724.267.428 triliun rupiah dengan standar deviasi sebesar 640306.8459.

Pada Dana Desa memiliki total observasi yang berjumlah 376. Variabel Dana Desa ini menunjukkan nilai terendah sebesar 9.547,068 triliun rupiah di Kabupaten Sukamara pada tahun 2015, sementara nilai tertinggi sebesar 348604.26 (milyar rupiah) di Kabupaten Sintang pada tahun 2020. Nilai rata-rata pada variabel Dana Desa adalah sebesar 108853.746 dengan standar deviasi sebesar 61542.04243.

## **4.2 Pengujian Model Regresi**

### **4.2.1 *Common Effect Model (CEM)***

Data cross section dan time series digabungkan dalam pendekatan *common effect*. Pendekatan ini menghasilkan banyak pengamatan karena mengabaikan dimensi individu atau temporal. Tabel 4.2 menunjukkan hasil regresi menggunakan metode *common effect*.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.071655	0.525713	0.136301	0.8917
LOG(X1)	0.035607	0.036672	0.970952	0.3322
LOG(X2)	-0.079599	0.031439	-2.531900	0.0118
LOG(X3)	0.100829	0.060584	1.664274	0.0969
LOG(X4)	0.0483334	0.032670	1.479456	0.1399
COVID	-0.171189	0.078810	-2.172182	0.0305
R-squared	0.038769			
Adjusted R-squared	0.025779			
F-statistic	2.984610			
Prob(F-statistic)	0.011777			

**Tabel 4.2** Hasil regresi Model *common effect*

Sumber : Olah Data Eviews 13

#### 4.2.2 *Fixed Effect Model*

Metode *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa meskipun kemiringannya tetap, terdapat perubahan pada intersepnya. Variabel dummy digunakan dalam teknik estimasi data panel untuk menangkap perbedaan intersep. Tabel 4.3 menunjukkan hasil regresi menggunakan metode *Fixed Effect*.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.759029	0.540593	10.65316	0.0000
LOG(X1)	-0.199916	0.035080	-5.698799	0.0000
LOG(X2)	-0.039485	0.013509	-2.922884	0.0037
LOG(X3)	-0.001828	0.015363	-0.118962	0.9054
LOG(X4)	-0.029435	0.012707	-2.316406	0.0212
COVID	0.057980	0.022882	2.533931	0.0117
R-squared	0.971474			
Adjusted R-squared	0.966984			
F-statistic	216.3534			
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Tabel 4.3** Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 13

### 4.2.3 *Random Effect Model*

Model *Random Effect* rawan kesalahan, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Variabel gangguan digunakan dalam penilaian model ini, sehingga memungkinkan terciptanya hubungan antar individu dan dari waktu ke waktu. Tabel 4.4 menunjukkan hasil regresi menggunakan metode *Random Effect*.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.687901	0.470057	9.973039	0.0000
LOG(X1)	-0.133939	0.030597	-4.377559	0.0000
LOG(X2)	-0.031496	0.013213	-2.383699	0.0176
LOG(X3)	0.005811	0.015235	0.381419	0.7031
LOG(X4)	-0.043761	0.011995	-3.648149	0.0003
COVID	0.029862	0.021783	1.370892	0.1712
R-squared	0.217018			
Adjusted R-squared	0.206437			
F-statistic	20.51043			
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Tabel 4.4** Hasil Regresi Model *Random Effect*

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 13

### 4.3 Pemilihan Model

Pemilihan model pada panel regresi data bertujuan untuk memperoleh model terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* yang selanjutnya akan digunakan dalam estimasi hasil penelitian. Pemilihan model ini dapat dilakukan dengan tiga alternatif pengujian, yaitu Uji F untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, Uji Hausman untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*, dan terakhir Uji *Lagrange Multiplier* untuk membandingkan *Random Effect Model* dengan *Common Effect Model*.

#### 4.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel dengan asumsi bahwa intersep dan slope adalah sama (*common effect model*) atau estimasi data panel dengan asumsi intersep berbeda tetapi slope tetap sama (*fixed effect model*). Hipotesisnya dapat ditulis sebagai berikut :

$H_0$  : *Common effect model* lebih tepat daripada *Fixed effect model*.

$H_a$  : *Fixed effect model* lebih tepat daripada *Common effect model*.

Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	230.297494	(46,324)	0.0000
Cross-section Chi-square	1322.540779	46	0.0000

**Tabel 4.7. Hasil Uji F**

Sumber : Olah Data Eviews 12

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa probabilitas 0,0000 < alpha 5% artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang paling efektif dalam Uji F

#### 4.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel *random effect model* atau estimasi data panel *common effect model* metode OLS. Hipotesisnya ditulis sebagai berikut :

$H_0$  : *Common effect model* lebih tepat daripada *Random effect model*.

$H_a$  : *Random effect model* lebih tepat daripada *Common effect model*.

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1119.073 (0.0000)	1.963846 (0.1611)	1121.037 (0.0000)
Honda	33.45255 (0.0000)	1.401373 (0.0806)	24.64545 (0.0000)
King-Wu	33.45255 (0.0000)	1.401373 (0.0806)	13.46294 (0.0000)
Standardized Honda	34.88445 (0.0000)	2.513474 (0.0060)	22.96733 (0.0000)
Standardized King-Wu	34.88445 (0.0000)	2.513474 (0.0060)	12.63929 (0.0000)

Gourieroux, et al.	--	--	1121.037 (0.0000)
--------------------	----	----	----------------------

**Tabel 4.8. Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 13

Berdasarkan hasil Uji LM tabel 4.8  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_a$  diterima karena probabilitas Breusch-Pangan  $0,0000 < \alpha 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* merupakan model paling efektif dalam uji LM.

#### 4.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan cara membandingkan *random effect model* yang berasumsi bahwa terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode GLS atau *fixed effect model* yang berasumsi bahwa tidak terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode OLS. Hipotesisnya ditulis sebagai berikut :

$H_0$  : *Random effect model* lebih tepat daripada *Fixed effect model*.

$H_a$  : *Fixed effect model* lebih tepat daripada *Random effect model*.

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.392992	5	0.0007

**Tabel 4.9. Hasil Uji Hausman**

Sumber : Olah Data Eviews 13

Berdasarkan hasil uji hausman pada table 4.9. menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0.0007 < \alpha 5\%$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang optimal pada uji Hausman.

#### 4.4 Analisis Hasil Regresi

##### 4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independent mampu menjelaskan varian dari variabel dependen. Didapatkan nilai R-Square 0.971474 yang artinya variabel PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa mampu menjelaskan variabel persentase penduduk miskin 47 kabupaten di Provinsi Kalimantan sebesar 97.1%, sedangkan sisanya sebesar 2,9% dijelaskan oleh variabel diluar model.

##### 4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik digunakan untuk mengidentifikasi variabel independen dalam model regresi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect model* yang diperoleh adalah  $H_0$  ditolak apabila nilai uji F menghasilkan F statistik sebesar 216.3534 dengan nilai probabilitas  $0.000000 < \alpha$  5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Dana Desa secara bersamaan.

##### 4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independent dalam model mempengaruhi variabel dependen secara terpisah. Nilai t-statistik dan probabilitas masing-masing variabel penelitian menunjukkan temuan uji t. Variabel terkait dipengaruhi oleh masing-masing faktor bebas nilai probabilitasnya kurang dari  $\alpha$  10%.

Namun sebaliknya jika kemungkinan probabilitasnya melebihi 10%, maka orang tersebut tidak mempunyai pengaruh variabel terkait terhadap variabel bebas. Berikut hasil uraian t dalam penelitian ini :

Variable	t-Statistic	t-Kritis	Prob	$\alpha$	Keterangan
PDRB	-5.698799	1.67793	0	0.05	Signifikan
PENGANGGURAN	-2.922884	1.67793	0.0018	0.05	Signifikan
BELANJA PEMERINTAH	-0.118962	1.29982	0.4527	0.1	Tidak Signifikan
DANA DESA	-2.316406	1.67793	0.0106	0.05	Signifikan
COVID	2.533931	1.67793	0.0058	0.05	Signifikan

**Tabel 4.10 Hasil Uji T**

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 13

#### 4.4.3.1 Pengujian pengaruh PDRB terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial pada table 4.10 diperoleh hasil nilai probabilitas PDRB sebesar 0.0000, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari nilai alfa 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai t-statistik(absolut) sebesar 5.698799 lebih besar dari nilai t-kritis sebesar 1.67793, sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Ptovinsi Kalimantan.

#### 4.4.3.2 Pengujian pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan

Berdasarkan uji parsial pada table 4.10 diperoleh hasil nilai probabilitas Tingkat Pengangguran sebesar  $0.0037/2 = 0.0018$ , yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0018 lebih kecil dari nilai alfa 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai t-statistik(absolut) sebesar 2.922884 lebih besar dari nilai t-kritis sebesar 1.67793, sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Ptovinsi Kalimantan.

#### **4.4.3.3 Pengujian pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan**

Berdasarkan uji parsial pada table 4.10 diperoleh hasil nilai probabilitas Belanja Pemerintah sebesar  $0.9054/2 = 0.4527$  , yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.4527 lebih besar dari nilai alfa 0.10 ( $\alpha = 10\%$ ). Nilai t-statistik(absolut) sebesar 0.118962 lebih kecil dari nilai t-kritis sebesar 1.29982, sehingga gagal menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Ptovinsi Kalimantan.

#### **4.4.3.4 Pengujian pengaruh Dana Desa terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan**

Berdasarkan uji parsial pada table 4.10 diperoleh hasil nilai probabilitas Dana Desa sebesar  $0.0212/2 = 0.0106$ , yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0106 lebih kecil dari nilai alfa 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai t-statistik(absolut) sebesar 2.316406 lebih besar dari nilai t-kritis sebesar 1.67793, sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Ptovinsi Kalimantan.

#### **4.4.3.5 Pengujian pengaruh Covid-19 terhadap Persentase Jumlah Kemiskinan**

Berdasarkan uji parsial pada table 4.10 diperoleh hasil nilai probabilitas Covid-19 sebesar  $0.0117/2 = 0.0058$ , yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.0058 lebih kecil dari nilai alfa 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai t-statistik(absolut) sebesar 2.533931 lebih besar dari nilai t-kritis sebesar 1.67793, sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Ptovinsi Kalimantan.

## **4.5 Interpretasi Hasil**

### **4.5.1 Hubungan PDRB Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel yang dilakukan pada penelitian ini serta hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa koefisien yang dimiliki variabel PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Nilai koefisien pada variabel PDRB sebesar -0.199916. Jika PDRB meningkat 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar 19,9916 persen dengan anggapan variabel lain tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Pratama (2020) dimana PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. PDRB berpotensi mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Apabila PDRB yang dihasilkan mengalami peningkatan maka secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat miskin, jika penyaluran merata hingga ke masyarakat miskin.

### **4.5.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel yang dilakukan pada penelitian ini serta hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa koefisien yang dimiliki variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Nilai koefisien pada variabel Tingkat Pengangguran sebesar -0.039485. Jika Tingkat Pengangguran meningkat 1 persen maka jumlah penduduk miskin juga akan menurun sebesar 3.94 persen dengan anggapan variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten di Provinsi Kalimantan memiliki pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Maka dalam hal ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Yacoub(2012) dimana Pengangguran berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan namun terbentuk hubungan yang berlawanan arah (negatif) yang secara teori seharusnya searah (positif), sebagai contoh ketika seorang penganggur dalam satu rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga lain yang bekerja dengan tingkat penghasilan yang tinggi sehingga cukup untuk menghidupi si penganggur. Terkait dengan kemiskinan, penganggur dalam rumah tangga tersebut tidak serta merta menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya di atas garis kemiskinan (Yacoub,2012).

#### **4.5.3 Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel yang dilakukan pada penelitian ini serta hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa koefisien yang dimiliki variabel Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Nilai koefisien pada variabel Belanja Pemerintah sebesar -0.001828. Jika Belanja Pemerintah meningkat 1 persen, maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar 0.18 persen dengan anggapan variabel lain tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Putri dan Putri (2021) dimana Belanja Pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan disebabkan karna kurangnya perhatian pemerintah terhadap dana belanja pemerintah yang kebanyakan dialokasikan untuk perlindungan sosial, seperti program bantuan tunai, program keluarga harapan, subsidi, dan proyek-proyek lainnya yang mana hal ini kurang tepat sasaran. Yang mana dari program-program tersebut hanya untuk memenuhi biaya konsumsi masyarakat miskin, Adapun kesalahan dalam menentukan siapa yang termasuk (inklusi) dan siapa yang tidak (eksklusi) sehingga

belanja pemerintah tidak dapat secara efektif membantu masyarakat miskin yang membutuhkan.

#### **4.5.4 Hubungan Dana Desa terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel yang dilakukan pada penelitian ini serta hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa koefisien yang dimiliki variabel Dana Desa berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Nilai koefisien pada variabel Dana Desa sebesar  $-0.029435$ . Jika dana desa meningkat sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Provinsi Kalimantan akan menurun sebesar 2.94 persen dengan anggapan variabel lain tetap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniswari (2022) dimana Dana Desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Melalui dana desa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat yang mana nantinya akan memberikan potensi bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil pendapatan dan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

#### **4.5.5 Hubungan Covid 19 terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel yang dilakukan pada penelitian ini serta hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa koefisien yang dimiliki variabel Covid 19 berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Nilai koefisien pada variabel Covid 19 sebesar  $0.057980$ . Jika Covid 19 meningkat sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin 47 kabupaten di Provinsi Kalimantan akan menurun sebesar 5.79 persen dengan anggapan variabel lain tetap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2024) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Yang mana artinya jika pandemi covid-19 masih berlangsung maka akan membuat perekonomian

menjadi lesu karena banyaknya usaha yang tutup karena sedikitnya tingkat konsumsi barang atau jasa masyarakat akibat *lockdown* dan PSBB.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan Utama**

Penelitian ini menganalisis pengaruh berbagai faktor ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, belanja pemerintah, dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan selama periode 2017-2022. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan**

Peningkatan PDRB di provinsi-provinsi Kalimantan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, pertumbuhan PDRB tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

##### **2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Tingkat pengangguran yang tinggi di Kalimantan menjadi salah satu faktor penyumbang utama terhadap tingginya angka kemiskinan di wilayah ini. Ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, serta kurangnya diversifikasi ekonomi dan keterampilan tenaga kerja, memperburuk situasi pengangguran dan kemiskinan.

##### **3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

Belanja pemerintah di Provinsi Kalimantan yang cenderung meningkat setiap tahun mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, efektivitas belanja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan

sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi program yang tepat sasaran. Tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang lambat dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

#### 4. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Alokasi dana desa yang signifikan di provinsi-provinsi Kalimantan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Penggunaan dana desa yang efektif mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dana yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat desa.

#### 5. Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Kemiskinan

Pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kalimantan. Analisis menunjukkan bahwa pandemi ini memperburuk kondisi ekonomi dan sosial, yang menyebabkan lonjakan angka kemiskinan di berbagai kabupaten. Pandemi juga menyoroti kerentanan ekonomi yang ada, terutama bagi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal atau rentan.

### 5.2 Implikasi Kebijakan

Implikasi dari hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai analisis pengaruh PDRB, Jumlah Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dana Desa, dan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tahun 2015-2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan PDRB diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana hal ini dapat meningkatkan produktivitas di sektor-sektor strategis dengan meingkatkan infrastruktur dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata agar pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan.

2. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan akan menjadi sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dengan adanya fasilitas dan dukungan dari pemerintah diharapkan mampu menanggapi masalah pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Kalimantan.
3. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyaluran Dana Desa harus dilakukan dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan begitu Dana Desa diharapkan mempunyai dampak positif kepada masyarakat dan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan energi lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan di Provinsi Kalimantan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *statistik indonesia*. <https://www.bps.go.id/id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, K. K. R. I. (2022). *Data APBD*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Erliza Millenia, Putri and , Dewi Zaini, P. (2021). *Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains/article/view/115640/105870>
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 3, 21.
- P.Todaro, M. (2000). *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga. Vol 7*.
- Pratama, A. (2022). *Analisis PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020*. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/41672/18313180.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Primadani, Yulistya and , Muhammad Arif, SE., M. E. D. (2022). *Pengaruh Dana Desa, Pdrb, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2016-2020*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/102652>
- Roseline Cantika, F. (2023). *Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/74977/3/SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf>
- Sriyana, j. (2014). *Metode Regresi Data Panel*.
- Utari Sri, A. (2024). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap PDRB Perkapita, Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Provinsi Riau*. <https://jurnal.sticalwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/view/1507/707>

Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Prosiding Seminar Akademik Tabunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan.*

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews.*

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.*  
[http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/63/06-eksos 4 yarlina okt12.pdf?sequence=1](http://repository.polnep.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/63/06-eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf?sequence=1)

## LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Data PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Pemerintah,  
Dana Desa, dan Covid-19 Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Periode  
2015-2022.

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan	PDRB	Pengangguran	Belanja Pemerintah	Dana Desa	Covid 19
TANAH LAUT	2015	4.58	10801880	7139	356721.9294	35675.465	0
TANAH LAUT	2016	4.65	11392820	7139	481368.2584	80027.266	0
TANAH LAUT	2017	4.6	12329410	5932	500731.516	101842.951	0
TANAH LAUT	2018	4.4	13241240	5373	642127.0296	92050.2397	0
TANAH LAUT	2019	4.51	13902300	5827	496183.5249	106247.715	0
TANAH LAUT	2020	4.26	13786690	6490	465549.2866	107506.385	0
TANAH LAUT	2021	4.57	15332870	6506	1894067.927	109494.413	1
TANAH LAUT	2022	3.86	19022370	7675	1863861.922	104093.7904	1
KOTABARU	2015	4.62	18235340	8937	336502.2304	53625.14	0
KOTABARU	2016	4.56	19489360	8937	485332.9212	118062.1634	0
KOTABARU	2017	4.38	21336570	6740	497048.4388	152577.7272	0
KOTABARU	2018	4.52	22863020	7760	497048.4388	144947.05	0
KOTABARU	2019	4.49	24113350	7723	445146.1325	165433.272	0
KOTABARU	2020	4.22	23957050	7810	436463.7265	167711.6215	0
KOTABARU	2021	4.86	26492460	9288	1525538.87	163977.767	1
KOTABARU	2022	4.3	33266250	10762	1649004.076	162429.8539	1
BANJAR	2015	3.26	12480880	9651	486375.3192	73258.762	0
BANJAR	2016	3.1	13339970	9651	556021.5182	164329.907	0
BANJAR	2017	2.96	14411980	9212	643087.2706	209154.295	0
BANJAR	2018	2.7	15569050	8812	636852.6559	188881.942	0
BANJAR	2019	2.72	16626080	8953	655898.074	213261.986	0
BANJAR	2020	2.55	16527380	12317	564772.8792	215477.025	0
BANJAR	2021	3.04	17934870	12568	1732416.552	216454.3862	1
BANJAR	2022	2.79	21071220	8529	1853382.074	213931.3438	1
BARITO KUALA	2015	5.37	6250390	3165	316370.6867	52010.789	0
BARITO KUALA	2016	5.22	6843250	3165	625065.6496	116661.816	0

BARITO KUALA	2017	5.13	7444770	6745	509315.3176	148716.254	0
BARITO KUALA	2018	4.56	8055960	5108	427884.3467	132904.071	0
BARITO KUALA	2019	4.63	8696330	4078	438364.5829	151310.8548	0
BARITO KUALA	2020	4.51	8710470	5046	434358.6633	153420.269	0
BARITO KUALA	2021	5.11	9174920	5684	1273507.651	154055.221	1
BARITO KUALA	2022	4.75	9867870	6075	1372548.574	147723.076	1
TAPIN	2015	3.88	6474840	4859	287035.8281	34008.058	0
TAPIN	2016	3.7	6897020	4859	428410.7841	76292.716	0
TAPIN	2017	3.77	7430810	4301	423313.8001	96938.641	0
TAPIN	2018	3.7	7999160	3931	423313.8001	88565.041	0
TAPIN	2019	3.41	8438250	3586	412541.1233	100812.471	0
TAPIN	2020	3.06	8393890	3760	276278.6959	102204.375	0
TAPIN	2021	3.6	9387410	5078	1506125.212	102630.4325	1
TAPIN	2022	3.6	12771260	4289	1645505.852	93075.63676	1
HULU SUNGAI SELATAN	2015	6.45	4782060	3255	353952.6476	38943.517	0
HULU SUNGAI SELATAN	2016	6.29	5198550	3255	518234.9534	87363.772	0
HULU SUNGAI SELATAN	2017	5.8	5655330	2443	462693.1496	111087.811	0
HULU SUNGAI SELATAN	2018	5.21	6158260	2911	509051.7042	104769.8358	0
HULU SUNGAI SELATAN	2019	5.33	6555480	3032	500570.2317	118380.3532	0

HULU SUNGAI SELATAN	2020	5.17	6564930	2903	473298.7807	117434.196	0
HULU SUNGAI SELATAN	2021	4.84	7125710	3030	1420783.809	118303.532	1
HULU SUNGAI SELATAN	2022	4.54	8442000	2881	1408914.77	107798.562	1
HULU SUNGAI TENGAH	2015	5.81	5135880	4132	271850.9257	43184.366	0
HULU SUNGAI TENGAH	2016	6.18	5647630	4132	410733.5568	96875.855	0
HULU SUNGAI TENGAH	2017	6.09	6109980	5963	379978.8506	123375.091	0
HULU SUNGAI TENGAH	2018	6.01	6579340	5112	379978.8506	113048.455	0
HULU SUNGAI TENGAH	2019	5.93	7039390	3940	398090.7752	127754.747	0
HULU SUNGAI TENGAH	2020	5.64	7052350	5622	375469.1448	128420.199	0
HULU SUNGAI TENGAH	2021	6.18	7393860	5400	1162809.817	129319.968	1
HULU SUNGAI TENGAH	2022	5.92	7947590	4676	1222034.891	122078.074	1
HULU SUNGAI UTARA	2015	7.07	3563520	3551	286744.1344	56084.281	0

HULU SUNGAI UTARA	2016	6.76	3865390	3551	464189.9996	126936.398	0
HULU SUNGAI UTARA	2017	6.65	4190380	4855	417694.4732	161380.6594	0
HULU SUNGAI UTARA	2018	6.38	4573840	4446	417694.4732	155822.737	0
HULU SUNGAI UTARA	2019	6.5	4940270	3917	457564.9072	174701.975	0
HULU SUNGAI UTARA	2020	6.14	4968810	5451	367959.9362	172389.277	0
HULU SUNGAI UTARA	2021	6.83	5253450	5999	1215368.679	172222.9836	1
HULU SUNGAI UTARA	2022	6.49	5670770	5688	1227786.175	152293.921	1
TABALONG	2015	6.59	14846410	3985	286175.2242	33589.672	0
TABALONG	2016	6.35	15276910	3985	444383.7292	74796.14	0
TABALONG	2017	6.09	16211700	5123	340937.4377	94554.074	0
TABALONG	2018	5.95	17319540	4124	479958.324	93539.641	0
TABALONG	2019	6.01	18175410	4143	457441.0493	106611.659	0
TABALONG	2020	5.72	17742460	3991	420080.8341	107396.298	0
TABALONG	2021	6.27	19939940	4666	1480610.083	109057.503	1
TABALONG	2022	5.87	29172290	6219	1543299.818	98556.423	1
TANAH BUMBU	2015	5.55	16026160	12827	537066.9679	39686.346	0
TANAH BUMBU	2016	5.27	16559270	12827	642283.2684	88780.8521	0
TANAH BUMBU	2017	4.99	17861270	10566	469273.2931	111782.0192	0
TANAH BUMBU	2018	4.88	19074220	10654	469273.2931	105407.728	0

TANAH BUMBU	2019	4.85	20036050	10749	765146.4995	121078.777	0
TANAH BUMBU	2020	4.6	19899650	13491	742267.4159	120771.786	0
TANAH BUMBU	2021	4.82	22664050	13353	1798948.468	122791.351	1
TANAH BUMBU	2022	4.26	31609990	13217	2019856.013	114913.176	1
BALANGAN	2015	5.87	9252730	2801	247160.2945	41053.554	0
BALANGAN	2016	5.67	9418510	2801	389562.7362	92090.791	0
BALANGAN	2017	5.68	10061820	1345	326890.6934	116477.4542	0
BALANGAN	2018	5.59	10751680	1598	381017.4912	104545.595	0
BALANGAN	2019	5.55	11027660	1517	427303.1222	117281.5924	0
BALANGAN	2020	5.32	10722300	1789	411340.6039	118572.9545	0
BALANGAN	2021	6.07	12361610	1768	1094695.917	117097.7739	1
BALANGAN	2022	5.83	19847840	2830	1644691.137	107836.1772	1
Kab. Berau	2015	5.33	30077882	5507	651046.7153	28721.995	0
Kab. Berau	2016	5.37	30814337	5507	800377.9616	65077.2108	0
Kab. Berau	2017	5.41	35656556	6607	557163.4197	83206.738	0
Kab. Berau	2018	5.04	37661474	6108	617129.9707	90871.6535	0
Kab. Berau	2019	5.04	39104694	5642	807855.2997	108830.771	0
Kab. Berau	2020	5.19	35450849	5765	646741.5819	114600.6678	0
Kab. Berau	2021	5.88	43036483	6557	2253818.684	122237.695	1
Kab. Berau	2022	5.65	60158157	5715	2906895.452	87834.603	1
Kab. Kutai Kartanegara	2015	7.99	127151491	31397	2087552.28	54496.584	0
Kab. Kutai Kartanegara	2016	7.63	127869343	31397	1629903.294	112458.7347	0
Kab. Kutai Kartanegara	2017	7.57	149220000	19473	1442159.501	154151.6299	0
Kab. Kutai Kartanegara	2018	7.41	161920386	21361	1052383.825	157684.8889	0
Kab. Kutai Kartanegara	2019	7.2	162105544	22607	1171930.083	181918.3278	0
Kab. Kutai Kartanegara	2020	7.31	149045197	20497	820743.9695	185547.777	0

Kab. Kutai Kartanegara	2021	7.99	177416584	21544	4714130.498	191029.9317	1
Kab. Kutai Kartanegara	2022	7.96	240392590	15430	5475960.55	176844.267	1
Kab. Kutai Barat	2015	8.33	21298290	8130	767170.8586	52527.959	0
Kab. Kutai Barat	2016	8.65	22021133	8130	746949.7041	117719.873	0
Kab. Kutai Barat	2017	8.72	25787194	4100	492380.2742	149709.702	0
Kab. Kutai Barat	2018	9.15	28353171	3710	645685.1944	148195.189	0
Kab. Kutai Barat	2019	9.09	29135145	3684	675795.6322	173097.834	0
Kab. Kutai Barat	2020	9.29	27169271	3986	759517.6839	177923.483	0
Kab. Kutai Barat	2021	10.24	32093136	4262	2158396.44	181022.9506	1
Kab. Kutai Barat	2022	10.2	43410261	3695	2342639.724	157102.2534	1
Kab. Kutai Timur	2015	9.31	93539102	6998	933956.7567	40718.564	0
Kab. Kutai Timur	2016	9.16	95186296	6998	1522189.043	90598.22426	0
Kab. Kutai Timur	2017	9.29	120264729	7641	1211018.934	117335.5376	0
Kab. Kutai Timur	2018	9.22	127935404	10701	1132340.527	140507.9683	0
Kab. Kutai Timur	2019	9.48	133873513	10410	1328864.339	169261.4019	0
Kab. Kutai Timur	2020	9.55	115555662	10536	1304653.594	181716.8999	0
Kab. Kutai Timur	2021	9.81	136617573	10551	2843825.473	191526.088	1
Kab. Kutai Timur	2022	9.28	211101484	13171	4047272.765	142421.6281	1
Kab. Paser	2015	8.76	38309278	11013	839294.0881	38399.181	0
Kab. Paser	2016	8.68	37289694	11013	649130.358	82998.76405	0
Kab. Paser	2017	9.28	43954255	6764	652900.8883	110045.744	0
Kab. Paser	2018	9.03	48054118	6794	643609.1846	104926.3366	0

Kab. Paser	2019	8.95	48025891	6266	766356.0121	121075.0686	0
Kab. Paser	2020	9.23	43234506	6437	718626.1951	125182.3863	0
Kab. Paser	2021	9.73	53888949	7948	2363166.913	127189.0866	1
Kab. Paser	2022	9.43	76262455	6528	2540654.534	115078.0086	1
Kab. Penajam Paser Utara	2015	7.92	7452308.7	5045	418056.9211	9638.388	0
Kab. Penajam Paser Utara	2016	7.49	7681674.1	5045	580331.3476	21639.04	0
Kab. Penajam Paser Utara	2017	7.63	8480809	3261	408497.8605	27736.025	0
Kab. Penajam Paser Utara	2018	7.4	8877834.1	3536	539825.5747	28609.375	0
Kab. Penajam Paser Utara	2019	7.18	9124942.1	4694	543602.6363	34774.857	0
Kab. Penajam Paser Utara	2020	7.36	9050576.5	5104	466942.957	36490.369	0
Kab. Penajam Paser Utara	2021	7.61	10089908	2365	1128312.802	38775.111	1
Kab. Penajam Paser Utara	2022	7.25	13128955	1755	1542125.982	27029.362	1
Kab. Mahakam Ulu	2015	10.5	1980622.5	655	146192.5391	16039.742	0
Kab. Mahakam Ulu	2016	10.65	1980622.5	655	225122.412	31812.3436	0
Kab. Mahakam Ulu	2017	11.29	2337696.1	1290	352282.3124	46407.8972	0
Kab. Mahakam Ulu	2018	11.62	2511282.4	616	302923.0258	55962.4366	0
Kab. Mahakam Ulu	2019	11.25	2718225.6	487	293391.9689	71741.5022	0
Kab. Mahakam Ulu	2020	11.44	2765994.4	525	312710.6104	77626.277	0
Kab. Mahakam Ulu	2021	11.9	2972865.6	470	1217225.25	73210.7944	1
Kab. Mahakam Ulu	2022	11.55	3169293.3	347	1169402.004	48520.46675	1
Kab. Barito Selatan	2015	5.07	4443100	6363	291529.8141	24398.744	0
Kab. Barito Selatan	2016	4.58	4889200	6363	349715.3479	54670.9498	0

Kab. Barito Selatan	2017	4.44	5410100	2433	317286.7388	69302.851	0
Kab. Barito Selatan	2018	4.55	5946400	2586	327447.6456	70221.5342	0
Kab. Barito Selatan	2019	4.39	6369100	2866	331852.4757	81993.48	0
Kab. Barito Selatan	2020	4.45	6277900	2815	330300.7127	84867.414	0
Kab. Barito Selatan	2021	4.62	6681100	2763	970572.3274	86325.48288	1
Kab. Barito Selatan	2022	4.88	8131600	2468	1021263.414	71130.14224	1
Kab. Barito Utara	2015	5.93	6708100	3199	261235.2162	25996.772	0
Kab. Barito Utara	2016	5.38	7358800	3199	320712.3701	58142.276	0
Kab. Barito Utara	2017	5.21	8254800	3304	351943.2134	74042.909	0
Kab. Barito Utara	2018	5	9220700	2952	389627.1954	76315.979	0
Kab. Barito Utara	2019	4.95	9801100	2633	336828.4373	90156.152	0
Kab. Barito Utara	2020	5.17	9391700	3695	338589.1842	92744.604	0
Kab. Barito Utara	2021	5.61	10565200	3570	1096531.379	94476.699	1
Kab. Barito Utara	2022	5.8	14297600	3358	1268831.766	77474.633	1
Kab. Kapuas	2015	6.03	10757100	7147	436016.5886	58492.211	0
Kab. Kapuas	2016	5.7	12002900	7147	741407.245	130621.2404	0
Kab. Kapuas	2017	5.32	13561500	9340	633176.2168	165804.64	0
Kab. Kapuas	2018	5.2	15177600	7299	611014.6859	160073.599	0
Kab. Kapuas	2019	5.09	16616800	9329	553732.7258	182873.0106	0
Kab. Kapuas	2020	5.04	16565100	9481	398604.393	187286.7657	0
Kab. Kapuas	2021	5.35	18695900	9472	1760768.381	185046.2638	1
Kab. Kapuas	2022	5.52	22994900	7221	1985108.337	180748.58	1
Kab. Kotawaringin Barat	2015	5.07	13128600	4738	329967.3037	23437.745	0

Kab. Kotawaringin Barat	2016	4.96	14578500	4738	405926.6931	52549.903	0
Kab. Kotawaringin Barat	2017	4.52	16344800	3213	414600.1861	66116.5176	0
Kab. Kotawaringin Barat	2018	4.27	17827400	4646	423726.9027	65247.8828	0
Kab. Kotawaringin Barat	2019	4.11	19332100	4318	430412.2929	77629.2344	0
Kab. Kotawaringin Barat	2020	3.59	20521900	8136	505478.4566	81413.8076	0
Kab. Kotawaringin Barat	2021	3.95	23708800	7850	1461583.804	84755.00478	1
Kab. Kotawaringin Barat	2022	3.93	26265100	7535	1420053.654	69814.09309	1
Kab. Kotawaringin Timur	2015	6.42	17292500	7273	585882.7349	46933.725	0
Kab. Kotawaringin Timur	2016	6.32	19622900	7273	606344.6757	105230.485	0
Kab. Kotawaringin Timur	2017	6.24	22390700	10052	516605.5215	133804.488	0
Kab. Kotawaringin Timur	2018	6.21	24565400	10047	498509.8632	126501.5478	0
Kab. Kotawaringin Timur	2019	5.9	26809500	9947	646712.0429	153007.699	0
Kab. Kotawaringin Timur	2020	5.62	26996300	12076	629123.5834	157931.9174	0

Kab. Kotawaringin Timur	2021	5.91	29678200	11872	1805455.157	162173.2383	1
Kab. Kotawaringin Timur	2022	5.95	33357900	10790	1902863.572	144196.324	1
Kab. Katingan	2015	6.53	5481000	4849	314318.9854	42703.96	0
Kab. Katingan	2016	6.23	6127500	4849	380180.8022	95726.104	0
Kab. Katingan	2017	5.78	6805600	2942	442812.1956	121732.9412	0
Kab. Katingan	2018	5.22	7526200	3934	423073.9952	123109.6854	0
Kab. Katingan	2019	5.02	8223700	4625	368672.5474	143866.3608	0
Kab. Katingan	2020	4.79	8297200	4677	330940.3493	147441.003	0
Kab. Katingan	2021	5.25	9040900	4586	1208390.802	150640.826	1
Kab. Katingan	2022	5.5	9965600	4642	1331475.977	129610.032	1
Kab. Seruyan	2015	8.5	6265100	4338	196383.5057	28115.888	0
Kab. Seruyan	2016	8.08	6909300	4338	385503.066	63012.942	0
Kab. Seruyan	2017	7.46	7585600	4809	330261.7759	80001.40421	0
Kab. Seruyan	2018	7.43	8061800	4515	325561.1349	82532.1528	0
Kab. Seruyan	2019	7.19	8552200	4683	308050.9894	99900.3236	0
Kab. Seruyan	2020	6.85	8768500	4281	303582.6611	105935.982	0
Kab. Seruyan	2021	7.22	9890100	4792	1107681.473	111355.806	1
Kab. Seruyan	2022	7.43	10808700	4652	1071565.463	88517.6554	1
Kab. Sukamara	2015	4.32	2884800	1328	197898.4925	9547.068	0
Kab. Sukamara	2016	3.73	3205100	1328	268897.9358	21426.006	0
Kab. Sukamara	2017	3.36	3580000	1533	181444.5677	26368.843	0
Kab. Sukamara	2018	3.19	3876200	1435	232663.1616	28277.201	0
Kab. Sukamara	2019	3.16	4193500	1612	206128.4333	35377.75	0
Kab. Sukamara	2020	3.23	4421500	1466	200548.6177	37440.32422	0
Kab. Sukamara	2021	3.66	4943700	1635	584245.01	39748.25746	1
Kab. Sukamara	2022	3.72	5460000	2274	691476.2667	24979.655	1
Kab. Lamandau	2015	3.95	3661300	1932	211643.5343	23727.12	0
Kab. Lamandau	2016	3.8	4072700	1932	325441.2828	53243.208	0
Kab. Lamandau	2017	3.52	4524300	569	328760.4804	67601.069	0

Kab. Lamandau	2018	3.15	5005100	919	311020.4466	65117.04715	0
Kab. Lamandau	2019	3.01	5489900	955	243194.095	76755.627	0
Kab. Lamandau	2020	3.09	5773800	1233	236788.3735	78880.571	0
Kab. Lamandau	2021	3.56	6566600	1024	850723.5859	80758.472	1
Kab. Lamandau	2022	3.34	7315900	1541	950855.0844	65720.458	1
Kab. Gunung Mas	2015	6.17	3777400	1575	218895.2091	31860.684	0
Kab. Gunung Mas	2016	5.85	4234300	1575	330657.2054	70773.44772	0
Kab. Gunung Mas	2017	5.83	4694400	695	294470.9599	89682.366	0
Kab. Gunung Mas	2018	5.1	5159200	1329	417507.6677	85418.5054	0
Kab. Gunung Mas	2019	4.91	5737900	1604	341697.7708	100768.3	0
Kab. Gunung Mas	2020	4.75	6275000	1487	265603.3018	102539.5354	0
Kab. Gunung Mas	2021	5.35	7173200	1854	1035838.027	104946.1394	1
Kab. Gunung Mas	2022	5.64	8135300	1781	1043348.834	90215.18372	1
Kab. Pulang Pisau	2015	5.65	3649800	2209	187261.725	26925.265	0
Kab. Pulang Pisau	2016	5.49	4029800	2209	377056.5288	60371.448	0
Kab. Pulang Pisau	2017	5.19	4435300	1114	385532.3191	76714.521	0
Kab. Pulang Pisau	2018	4.51	4882500	1398	319317.8019	78360.356	0
Kab. Pulang Pisau	2019	4.24	5297900	1243	250147.0869	92074.702	0
Kab. Pulang Pisau	2020	4.09	5588500	1863	231781.4582	93915.684	0
Kab. Pulang Pisau	2021	4.24	5969700	1865	940235.2636	96743.984	1

Kab. Pulang Pisau	2022	4.7	6464800	1390	1038194.177	79514.196	1
Kab. Murung Raya	2015	6.57	5581900	3369	295953.9377	33420.862	0
Kab. Murung Raya	2016	6.32	6148600	3369	420413.0523	74578.649	0
Kab. Murung Raya	2017	5.88	6831100	1500	344913.0011	95929.093	0
Kab. Murung Raya	2018	6.28	7612000	1782	431809.0247	102176.18	0
Kab. Murung Raya	2019	6	8138100	1617	344754.2985	123560.091	0
Kab. Murung Raya	2020	5.85	7762800	1655	304131.7975	128015.9854	0
Kab. Murung Raya	2021	6.15	8917600	1740	1236734.582	133299.2032	1
Kab. Murung Raya	2022	6.4	12998600	1636	1332618.351	105302.9382	1
Kab. Barito Timur	2015	8.41	5099000	1417	216655.7768	27790.971	0
Kab. Barito Timur	2016	7.64	5627600	1417	275683.3753	62036.562	0
Kab. Barito Timur	2017	7.17	6323800	3055	425386.9813	77451.51	0
Kab. Barito Timur	2018	6.56	7043100	2421	325936.6306	73784.575	0
Kab. Barito Timur	2019	6.32	7548500	1940	260486.4618	81409.3164	0
Kab. Barito Timur	2020	6.09	7103700	2148	328293.0049	85820.1962	0
Kab. Barito Timur	2021	6.38	7949900	2435	920557.7004	85777.2274	1
Kab. Barito Timur	2022	6.59	10948100	2187	893668.7138	73795.812	1
Sambas	2015	9.42	14634425	12865	384248.9988	53305.112	0
Sambas	2016	8.54	16026436	12865	611512.2207	119850.177	0
Sambas	2017	8.59	17506899	10944	428674.0817	153185.7941	0
Sambas	2018	8.55	18984589	8873	494714.4292	172844.238	0
Sambas	2019	8.19	20529976	8873	585220.8223	204977.785	0
Sambas	2020	7.7	20669991	10879	463519.727	202703.1674	0

Sambas	2021	7.66	22290194	11534	1854895.555	202459.0809	1
Sambas	2022	6.92	24415408	15143	1816573.585	179518.572	1
Bengkayang	2015	6.94	6123475	3979	190645.8878	33788.893	0
Bengkayang	2016	7.46	6724042.4	3979	221155.8947	75781.481	0
Bengkayang	2017	7.51	7389965.4	2995	225040.8197	96738.761	0
Bengkayang	2018	7.17	7999796.4	3163	237657.6683	92400.237	0
Bengkayang	2019	6.96	8645003	3163	11180.58954	105939.1418	0
Bengkayang	2020	6.62	8672734	5513	262022.2847	108855.9857	0
Bengkayang	2021	6.48	9318527.8	5858	1070345.023	111676.1024	1
Bengkayang	2022	6.03	10324506	3831	1271920.12	104391.259	1
Landak	2015	13.51	7446559.2	10306	264302.3738	44721.021	0
Landak	2016	12.32	8193698.6	10306	367935.2081	100320.693	0
Landak	2017	12.23	8963775.9	3938	309306.5647	128080.279	0
Landak	2018	11.77	9755298	4477	430728.0854	154158.59	0
Landak	2019	11.47	10546905	4477	442380.2683	185369.629	0
Landak	2020	11.12	10739185	6733	322977.902	184032.6366	0
Landak	2021	10.99	11614173	6387	1285616.143	186033.2144	1
Landak	2022	10.01	12775765	3673	1365900.344	165590.2458	1
Mempawah	2015	5.52	5667621.2	7924	246232.4278	17748.753	0
Mempawah	2016	5.75	6320309.8	7924	382913.4501	39829.694	0
Mempawah	2017	5.94	6968917.7	7887	336523.4607	51323.606	0
Mempawah	2018	5.61	7603864.1	8261	336523.4607	55232.991	0
Mempawah	2019	5.32	8298154.6	8261	349930.5477	66548.772	0
Mempawah	2020	4.95	8545286.3	9478	302031.5292	66584.359	0
Mempawah	2021	5.18	9084515.8	9302	986967.3359	69503.188	1
Mempawah	2022	5.32	9955619.9	9499	1035892.382	59673.787	1
Sanggau	2015	4.57	14013181	12125	244306.8808	45474.645	0
Sanggau	2016	4.51	15472499	12125	466188.8989	101979.243	0
Sanggau	2017	4.52	16897887	7608	482181.1044	130042.037	0
Sanggau	2018	4.67	18119164	6024	482181.1044	128479.518	0
Sanggau	2019	4.57	19158574	6024	429238.5325	149860.398	0
Sanggau	2020	4.46	19921367	8840	407246.5158	152424.8504	0
Sanggau	2021	4.55	21678774	8665	1543687.479	158759.3028	1
Sanggau	2022	4.51	23847059	9707	1644295.745	150973.7828	1

Ketapang	2015	11.72	17549294	9792	523587.0179	68620.651	0
Ketapang	2016	10.99	20021146	9792	592496.9025	161144.686	0
Ketapang	2017	11.02	22495911	8346	631998.1688	202880.5494	0
Ketapang	2018	10.93	25000289	7685	563953.1964	217293.38	0
Ketapang	2019	10.54	27488713	7685	605098.2407	255830.33	0
Ketapang	2020	10.29	28105903	17044	531776.8606	260918.091	0
Ketapang	2021	10.13	30911316	17523	2354247.922	267548.0428	1
Ketapang	2022	9.39	34315187	16217	2366359.902	244030.3234	1
Sintang	2015	9.33	10216110	5052	403505.6953	77054.687	0
Sintang	2016	10.07	11202047	5052	608999.5931	202413.744	0
Sintang	2017	10.2	12282699	3969	600782.9881	294276.823	0
Sintang	2018	10.35	13390619	4870	523342.9295	294718.224	0
Sintang	2019	9.65	14681420	4870	538457.819	338481.456	0
Sintang	2020	9.27	14711074	10512	497864.8215	348604.262	0
Sintang	2021	9.28	15749079	9625	1860072.21	348528.098	1
Sintang	2022	8.57	17330129	6899	1802487.216	342843.467	1
Kapuas Hulu	2015	9.66	7059376.6	3888	378603.3473	76494.349	0
Kapuas Hulu	2016	9.82	7842491.2	3888	645683.3305	171469.372	0
Kapuas Hulu	2017	9.45	8678123.8	3159	526035.8744	218405.978	0
Kapuas Hulu	2018	9.6	9427193.3	2223	493688.4087	228933.717	0
Kapuas Hulu	2019	9.62	10205696	2223	572418.9636	267677.3224	0
Kapuas Hulu	2020	8.99	10273876	5901	469295.0661	271331.546	0
Kapuas Hulu	2021	8.93	11071935	6128	1744613.136	275008.9868	1
Kapuas Hulu	2022	8.59	12187101	3535	1615623.767	249744.5778	1
Sekadau	2015	6.5	4338988.7	3068	148148.7199	24783.186	0
Sekadau	2016	6.14	4808581.7	3068	242672.057	50636.8918	0
Sekadau	2017	6.46	5314817.4	741	231435.5847	71020.784	0
Sekadau	2018	6.17	5856919.5	3048	246750.4523	68763.68214	0
Sekadau	2019	6.11	6432288.9	3048	224691.284	80488.905	0
Sekadau	2020	5.87	6568785.1	3950	229760.4338	83765.63	0
Sekadau	2021	6.26	7132689.9	3179	837479.1448	87599.41459	1
Sekadau	2022	5.85	7884125.8	1513	901985.4784	78106.197	1
Melawi	2015	12.57	3670097.4	3090	215659.1841	47145.61	0
Melawi	2016	12.63	4007440	3090	279674.948	105356.8373	0

Melawi	2017	12.54	4359086.2	2360	313763.7401	132907.851	0
Melawi	2018	12.83	4740568.6	3401	249624.2288	130908.954	0
Melawi	2019	12.38	5143748.6	3401	321548.6146	152528.167	0
Melawi	2020	12.04	5232208.6	3118	248842.6937	156184.024	0
Melawi	2021	12.01	5626604.4	3056	1103871.885	159482.915	1
Melawi	2022	11.44	6176540.9	2339	1041062.858	148634.495	1
Kayong Utara	2015	9.84	2806810.3	1927	137893.2632	13492.118	0
Kayong Utara	2016	10.19	3152561	1927	282442.4974	30268.92	0
Kayong Utara	2017	9.89	3490006.3	2262	297562.2004	38665.294	0
Kayong Utara	2018	10.08	3796363.4	1993	282865.2146	39856.608	0
Kayong Utara	2019	9.98	4133122.2	1993	201228.8891	48091.8854	0
Kayong Utara	2020	9.56	4206755.3	2019	208291.0722	50921.86064	0
Kayong Utara	2021	9.33	4533731.2	2084	822833.2989	54050.9898	1
Kayong Utara	2022	9.04	4980741.5	1860	783566.317	40464.12994	1
Kubu Raya	2015	5.22	18894280	15848	273092.0053	34437.653	0
Kubu Raya	2016	5.04	21135942	15848	447476.4733	77211.484	0
Kubu Raya	2017	5.26	23700994	15041	346785.9171	98330.389	0
Kubu Raya	2018	5.07	26343572	12698	409085.0064	110330.425	0
Kubu Raya	2019	4.74	29105095	12698	313905.3464	131658.6732	0
Kubu Raya	2020	4.42	28930519	20758	408034.3106	133188.213	0
Kubu Raya	2021	4.34	31231417	20633	1658062.568	136673.183	1
Kubu Raya	2022	4.12	35275465	19643	1628205.312	125707.7476	1
Malinau	2015	7.26	6918591.9	2500	489821.586	34456.562	0
Malinau	2016	7.15	7288638.2	2800	643340.8561	77059.749	0
Malinau	2017	8.06	8497620.3	2497	601909.0072	97801.627	0
Malinau	2018	7.68	9364802.6	1931	542156.8416	118919.224	0
Malinau	2019	6.96	10618376	1794	487193.3755	148072.875	0
Malinau	2020	6.63	11155866	2097	429278.061	157973.035	0
Malinau	2021	7.3	12858769	1889	1353551.186	171145.649	1
Malinau	2022	6.64	17573724	1592	1354397.553	113793.572	1
Bulungan	2015	8.5	12975581	3200	469192.8176	22248.322	0
Bulungan	2016	8.99	13634741	3800	620945.7365	49850.296	0
Bulungan	2017	9.93	15265248	1727	357600.605	63362.696	0
Bulungan	2018	9.44	16796823	3464	430035.1465	67596.562	0

Bulungan	2019	8.78	18344047	3077	444601.0037	83963.363	0
Bulungan	2020	9.06	18736572	2956	491886.6438	88787.982	0
Bulungan	2021	10.03	20341959	3100	1213714.924	93665.034	1
Bulungan	2022	9.32	24222775	3245	1322875.038	72298.739	1
Tana Tidung	2015	6.35	3960303.9	1100	147461.2177	11147.189	0
Tana Tidung	2016	6.11	4209730.7	1400	196975.1001	25109.62	0
Tana Tidung	2017	6.63	4753743.1	612	243129.9535	30326.27059	0
Tana Tidung	2018	5.08	5145591.5	643	186701.4418	34235.379	0
Tana Tidung	2019	4.72	5663548.7	631	203122.5278	40377.31	0
Tana Tidung	2020	4.81	5873234.2	685	223331.686	42109.006	0
Tana Tidung	2021	5.15	6673092.2	781	731753.0456	44479.31	1
Tana Tidung	2022	4.45	8610140.6	576	747078.7114	28444.897	1
Nunukan	2015	5.61	15517932	4000	376819.0104	62022.821	0
Nunukan	2016	5.25	16501994	4500	484202.8225	138789.1063	0
Nunukan	2017	6.22	20040898	6818	445297.6529	177937.815	0
Nunukan	2018	6.71	22576029	4812	486505.2565	166800.519	0
Nunukan	2019	6.11	25430864	3870	409802.1609	190364.516	0
Nunukan	2020	6.36	26300564	4038	507348.0865	193752.469	0
Nunukan	2021	6.79	29779872	4204	1333829.177	193752.469	1
Nunukan	2022	6.13	40229006	2916	1277824.423	175362.1032	1

#### LAMPIRAN 2 : Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y1)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/17/24 Time: 13:35

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 47

Total panel (balanced) observations: 376

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.0716552	0.525713	0.136301	0.891657
LOG(X1)	0.0356067	0.036672	0.970952	0.332207
LOG(X2)	-0.079599	0.031439	-2.5319	0.011758
LOG(X3)	0.1008292	0.060584	1.664274	0.096904
LOG(X4)	0.0483335	0.03267	1.479456	0.139869
COVID	-0.171189	0.07881	-2.17218	0.030476

R-squared	0.0387689	Mean dependent var	1.82918
Adjusted R-squared	0.0257793	S.D. dependent var	0.348145
S.E. of regression	0.343628	Akaike info criterion	0.717315
Sum squared resid	43.689674	Schwarz criterion	0.780021
Log likelihood	-128.8551	Hannan-Quinn criter.	0.742207
F-statistic	2.9846096	Durbin-Watson stat	0.064555
Prob(F-statistic)	0.0117773		

LAMPIRAN 3 : Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y1)  
Method: Panel Least Squares  
Date: 08/17/24 Time: 13:46  
Sample: 2015 2022  
Periods included: 8  
Cross-sections included: 47  
Total panel (balanced) observations: 376

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.7590286	0.540593	10.65316	6.41E-23
LOG(X1)	-0.1999164	0.03508	-5.6988	2.71E-08
LOG(X2)	-0.0394852	0.013509	-2.92288	0.003712
LOG(X3)	-0.0018276	0.015363	-0.11896	0.905379
LOG(X4)	-0.0294352	0.012707	-2.31641	0.02116
COVID	0.0579803	0.022882	2.533931	0.01175

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.9714739	Mean dependent var	1.82918	
Adjusted R-squared	0.9669837	S.D. dependent var	0.348145	
S.E. of regression	0.0632593	Akaike info criterion	-2.5554	
Sum squared resid	1.2965619	Schwarz criterion	-2.01195	
Log likelihood	532.41524	Hannan-Quinn criter.	-2.33967	
F-statistic	216.35339	Durbin-Watson stat	0.856784	
Prob(F-statistic)	7.66E-221			

LAMPIRAN 4 : Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y1)  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 08/15/24 Time: 11:48  
Sample: 2015 2022  
Periods included: 8  
Cross-sections included: 47

Total panel (balanced) observations: 376  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.6879007	0.470057	9.973039	6.63E-21
LOG(X1)	-0.133939	0.030597	-4.37756	1.56E-05
LOG(X2)	-0.031496	0.013213	-2.3837	0.017643
LOG(X3)	0.0058107	0.015235	0.381419	0.703111
LOG(X4)	-0.043761	0.011995	-3.64815	0.000302
COVID	0.0298621	0.021783	1.370892	0.17124
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.341149	0.966759
Idiosyncratic random			0.063259	0.033241
Weighted Statistics				
R-squared	0.2170176	Mean dependent var		0.119663
Adjusted R-squared	0.2064368	S.D. dependent var		0.072662
S.E. of regression	0.064729	Sum squared resid		1.550244
F-statistic	20.510431	Durbin-Watson stat		0.748435
Prob(F-statistic)	4.39E-18			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.250558	Mean dependent var		1.82918
Sum squared resid	56.840122	Durbin-Watson stat		0.020413

#### LAMPIRAN 5 : Uji Chow

##### Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

##### Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	230.2975	-46,324	2.83E-220
Cross-section Chi-square	1322.541	46	6.70E-247

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y1)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/20/24 Time: 09:15

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 47

Total panel (balanced) observations: 376

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.0716552	0.525713	0.136301	0.891657
LOG(X1)	0.0356067	0.036672	0.970952	0.332207
LOG(X2)	-0.0795993	0.031439	-2.5319	0.011758
LOG(X3)	0.1008292	0.060584	1.664274	0.096904
LOG(X4)	0.0483335	0.03267	1.479456	0.139869
COVID	-0.1711891	0.07881	-2.17218	0.030476
R-squared	0.0387689	Mean dependent var		1.82918
Adjusted R-squared	0.0257793	S.D. dependent var		0.348145
S.E. of regression	0.343628	Akaike info criterion		0.717315
Sum squared resid	43.689674	Schwarz criterion		0.780021
Log likelihood	-128.85515	Hannan-Quinn criter.		0.742207
F-statistic	2.9846096	Durbin-Watson stat		0.064555
Prob(F-statistic)	0.0117773			

#### LAMPIRAN 6 : Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1119.073 0	1.963846 -0.1611	1121.037 0
Honda	33.45255 0	1.401373 -0.0806	24.64545 0
King-Wu	33.45255 0	1.401373 -0.0806	13.46294 0
Standardized Honda	34.88445 0	2.513474 -0.006	22.96733 0
Standardized King-Wu	34.88445 0	2.513474 -0.006	12.63929 0

Gourieroux, et al.	--	--	1121.037
			0

LAMPIRAN 7 : Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.39299	5	0.000683

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1)	-0.19992	-0.13394	0.000294	0.000121
LOG(X2)	-0.03949	-0.0315	7.91E-06	0.004499
LOG(X3)	-0.00183	0.005811	3.93E-06	0.000116
LOG(X4)	-0.02944	-0.04376	1.76E-05	0.000635
COVID	0.05798	0.029862	4.91E-05	5.97E-05

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y1)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/20/24 Time: 09:25

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 47

Total panel (balanced) observations: 376

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.759029	0.540593	10.65316	6.41E-23
LOG(X1)	-0.19992	0.03508	-5.6988	2.71E-08
LOG(X2)	-0.03949	0.013509	-2.92288	0.003712
LOG(X3)	-0.00183	0.015363	-0.11896	0.905379
LOG(X4)	-0.02944	0.012707	-2.31641	0.02116

COVID	0.05798	0.022882	2.533931	0.01175
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.971474	Mean dependent var	1.82918	
Adjusted R-squared	0.966984	S.D. dependent var	0.348145	
S.E. of regression	0.063259	Akaike info criterion	-2.5554	
Sum squared resid	1.296562	Schwarz criterion	-2.01195	
Log likelihood	532.4152	Hannan-Quinn criter.	-2.33967	
F-statistic	216.3534	Durbin-Watson stat	0.856784	
Prob(F-statistic)	7.66E-221			

